



Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Berikut akan disajikan penyelenggaraan urusan desentralisasi di Kabupaten Sleman dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Mengingat tahun 2010 baru berjalan 3 bulan, maka untuk penyelenggaraan urusan desentralisasi tahun 2010 akan disajikan informasi program dan kegiatan serta alokasi anggaran. Secara detail penyelenggaraan urusan desentralisasi adalah sebagai berikut:

## **B. Urusan Wajib**

### **1. Urusan Pendidikan**

Kebijakan pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Sleman pada tahun 2005-2010 adalah meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

Implementasi atas kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai program yang dilakukan yaitu:

- a. Program Pengembangan Potensi Anak
- b. Program Pemerataan Pendidikan Dasar, Menengah dan luar Sekolah
- c. Prgram Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
- d. Program Pembinaan akhlak dan budi pekerti
- e. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
- f. Program Peningkatan Mutu pendidikan dan tenaga Kependidikan
- g. Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar 12 tahun
- h. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah
- i. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal
- j. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak
- k. Program Peningkatan Manajemen Pendidikan
- l. Program Peningkatan Kreatifitas Siswa dan Guru



Pelaksanaan berbagai program pendidikan tersebut mampu meningkatkan indikator pembangunan pendidikan berupa angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni serta angka putus sekolah. Secara rinci indikator pembangunan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Pendidikan**

INDIKATOR	CAPAIAN SLEMAN					TARGET CAPAIAN NAS 2009
	2005	2006	2007	2008	2009	
▪ Angka Melek Huruf	89,70	91,35	92,17	92,99	93,04	95,00
▪ Angka Partisipasi Kasar SD/MI	111,11	114,74	115,34	115,67	115,79	114,90
▪ Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	98,25	114,84	114,99	115,01	115,87	95,72
▪ Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	74,03	74,32	75,04	75,45	75,73	64,01
▪ Angka Partisipasi Murni SD/MI	91,85	96,75	98,78	98,99	99,16	93,52
▪ Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	71,71	80,01	80,77	80,98	81,00	73,64
▪ Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	52,46	48,41	53,43	53,87	53,89	53,40
▪ Angka Putus Sekolah SD/MI	0,007	0,006	0,004	0,005	0,004	2,09
▪ Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,003	0,003	0,004	0,002	0,001	2,09
▪ Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,004	0,006	0,010	0,004	0,002	1,65

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

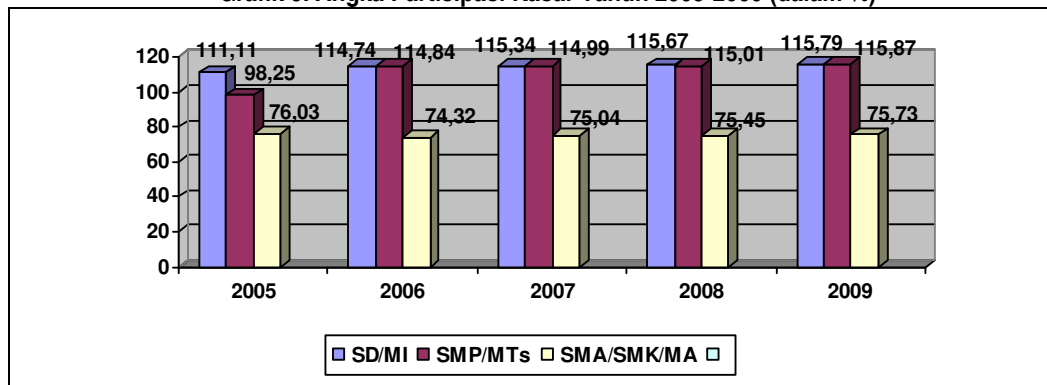
Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa angka partisipasi kasar SD/MI tahun 2005 sebesar 111,11 dan tahun 2009 sebesar 115,79 berarti ada peningkatan sebesar 4,68. Hal ini dikarenakan keberhasilan dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan tingginya anak-anak di bawah usia 7 tahun telah memasuki jenjang sekolah dasar. Capaian ini di atas capaian target nasional untuk angka partisipasi kasar sebesar 114,90 sehingga untuk Kabupaten Sleman telah berhasil di atas target nasional sebesar 0,89%.

Angka partisipasi kasar SMP/MTs tahun 2005 sebesar 98,25 dan tahun 2009 sebesar 115,87 berarti ada peningkatan sebesar 17,62%. Hal ini dikarenakan juga keberhasilan dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, tingginya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SMP dan tingginya anak-anak di bawah usia 13 tahun yang

telah memasuki jenjang SMP. Capaian ini di atas capaian target nasional untuk angka partisipasi kasar sebesar 95,72% sehingga untuk Kabupaten Sleman telah berhasil di atas target nasional sebesar 20,15%.

Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA tahun 2005 sebesar 74,03 dan tahun 2009 sebesar 75,73 berarti ada peningkatan sebesar 1,70%. Hal ini dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SMA/SMK/MA dan merupakan program rintisan wajib belajar 12 tahun. Capaian ini di atas capaian target nasional untuk angka partisipasi kasar sebesar 64,01% sehingga untuk Kabupaten Sleman telah berhasil di atas target nasional sebesar 11,72%. Hal ini bisa dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 5. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2005-2009 (dalam %)**



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

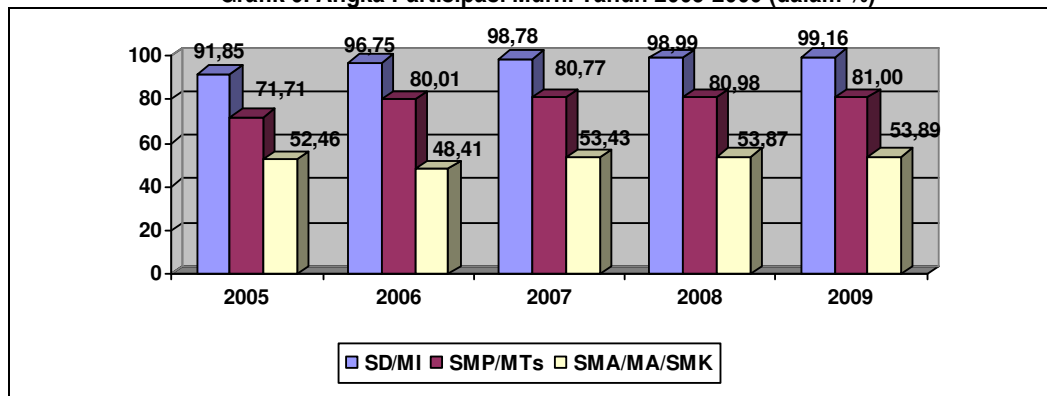
Angka partisipasi murni SD/MI tahun 2005 sebesar 91,85 dan tahun 2009 sebesar 99,16 berarti ada peningkatan sebesar 7,31. Hal ini dikarenakan keberhasilan dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan tingginya anak-anak di bawah usia 7 tahun telah memasuki jenjang sekolah dasar. Capaian ini di atas capaian target nasional untuk angka partisipasi murni sebesar 93,52 sehingga untuk Kabupaten Sleman telah berhasil di atas target nasional sebesar 5,64%.

Angka partisipasi murni SMP/MTs tahun 2005 sebesar 71,71 dan tahun 2009 sebesar 81,00 berarti ada peningkatan sebesar 9,29%. Hal ini dikarenakan juga keberhasilan dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar

9 tahun, tingginya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SMP dan tingginya anak-anak di bawah usia 13 tahun yang telah memasuki jenjang SMP. Capaian ini di atas capaian target nasional untuk angka partisipasi murni sebesar 73,64% sehingga untuk Kabupaten Sleman telah berhasil di atas target nasional sebesar 7,36%.

Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA tahun 2005 sebesar 52,46 dan tahun 2009 sebesar 53,89 berarti ada peningkatan sebesar 1,43. Hal ini dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SMA/SMK/MA dan merupakan program rintisan wajib belajar 12 tahun. Capaian ini di atas capaian target nasional untuk angka partisipasi murni sebesar 53,40% sehingga untuk Kabupaten Sleman berada di atas target nasional sebesar 0,49%. Hal ini bisa dilihat pada grafik berikut.

Grafik 6. Angka Partisipasi Murni Tahun 2005-2009 (dalam %)



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

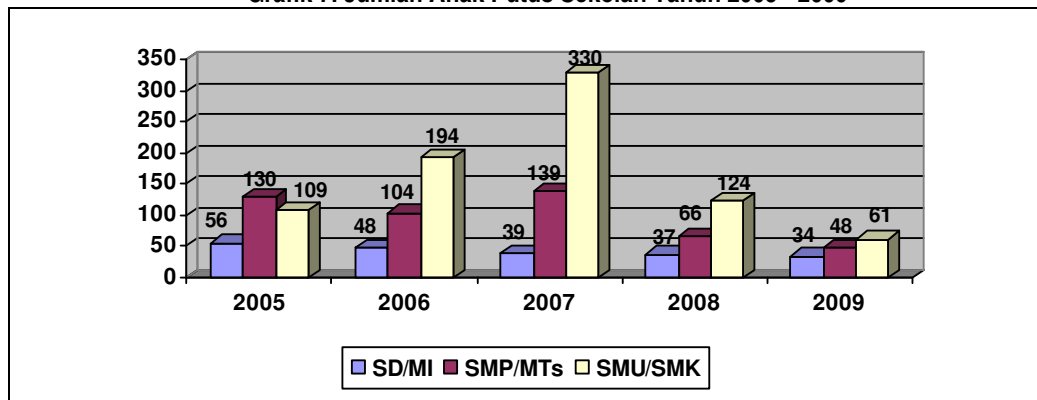
Angka putus sekolah SD/MI tahun 2005 sebesar 0,007 dan tahun 2009 sebesar 0,004 berarti ada penurunan sebesar 0,003. Angka putus sekolah dapat ditekan serendah mungkin dikarenakan adanya program retrieval anak-anak yang putus sekolah dan rawan putus sekolah serta adanya program beasiswa dan Bantuan operasional Sekolah Daerah (Bosda). Capaian ini telah melampaui jauh dari capaian target nasional untuk angka putus sekolah sebesar 2,09.



Angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2005 sebesar 0,003 dan tahun 2009 sebesar 0,001 berarti ada penurunan sebesar 0,002. Angka putus sekolah dapat ditekan serendah mungkin dikarenakan adanya program retriavel anak-anak yang putus sekolah dan rawan putus sekolah serta adanya program beasiswa dan Bantuan operasional Sekolah Daerah (Bosda). Capaian ini telah melampaui jauh dari capaian target nasional untuk angka putus sekolah sebesar 2,09.

Angka putus sekolah SMA/SMK/MA tahun 2005 sebesar 0,004 dan tahun 2009 sebesar 0,002 berarti ada penurunan sebesar 0,002. Angka putus sekolah dapat ditekan serendah mungkin dikarenakan adanya program retriavel anak-anak yang putus sekolah dan rawan putus sekolah serta adanya program beasiswa dan Jaminan Pendidikan. Capaian ini telah melampaui jauh dari capaian target nasional untuk angka putus sekolah sebesar 1,65.

**Grafik 7. Jumlah Anak Putus Sekolah Tahun 2005 - 2009**



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan maka selama 5 tahun dapat dilihat dari banyaknya tenaga pendidik, banyaknya sekolah, banyaknya ruang kelas, banyaknya siswa, rasio murid per guru, rasio murid per sekolah sebagaimana dalam tabel berikut ini:



**Tabel 3.2. Data Pelayanan Pendidikan**

Uraian	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Banyaknya Tenaga Pendidik (Orang)					
▪ TK/RA	1.560	1.781	2.172	2.093	2.228
▪ SD/MI	5.548	5.595	6.254	5.972	6.186
▪ SMP/MTs	3.488	3.448	3.420	3.336	3.242
▪ SMA/SMK/MA	3.753	3.698	3.773	3.757	3.681
Banyaknya Sekolah (Unit)					
▪ TK/RA	472	470	481	505	512
▪ SD/MI	531	515	521	516	515
▪ SMP/MTs	120	120	120	122	121
▪ SMA/SMK/MA	109	109	108	111	109
Banyaknya Kelas (Ruang)					
▪ TK/RA	1.066	1.059	1.171	1.171	1.182
▪ SD/MI	3.507	3.595	3.752	3.671	3.645
▪ SMP/MTs	936	967	1.016	1.034	1.246
▪ SMA/SMK/MA	1.001	1.086	1.031	1.005	1.222
Banyaknya Siswa (Anak)					
▪ TK/RA	23.233	22.840	24.387	25.140	26.120
▪ SD/MI	81.101	82.675	85.976	86.900	87.893
▪ SMP/MTs	36.795	36.993	37.639	38.376	39.068
▪ SMA/SMK/MA	28.335	28.654	29.029	29.532	32.534
Rasio Murid : Guru (Negeri dan Swasta)					
▪ TK/RA	13	13	11	11	12
▪ SD/MI	15	15	14	15	14
▪ SMP/MTs	11	11	11	12	12
▪ SMA/SMK/MA	8	8	9	9	9
Rasio Murid : Sekolah (Negeri dan Swasta)					
▪ TK/RA	42	42	51	52	51
▪ SD/MI	153	160	165	168	171
▪ SMP/MTs	329	330	336	336	323
▪ SMA/SMK/MA	272	282	306	314	298

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Dengan melihat tabel tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah tenaga pendidik TK/RA pada tahun 2005 sejumlah 1.560 orang dan pada tahun 2009 sebanyak 2.228 orang. Tenaga pendidik SD/MI pada tahun 2005 sejumlah 5.548 orang dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan sehingga menjadi 6.186 orang. Jumlah tenaga pendidik SMP/MTs pada tahun 2005 ada 3.488 orang dan pada tahun 2009 sebanyak 3.242 orang. Sedangkan tenaga pendidik SMA/SMK/MA pada tahun 2005 berjumlah 3.753 orang dan tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 3.681 orang.

Berdasarkan tabel tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa jumlah sekolah TK/RA pada tahun 2005 ada 472 unit dan pada tahun 2009 sebanyak 512 unit. Sekolah SD/MI pada tahun 2005 sejumlah 531 unit dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sehingga menjadi 515 unit. Jumlah SMP/MTs pada tahun 2005 ada 120 unit dan pada tahun 2009 sebanyak 121 unit. Sedangkan SMA/SMK/MA pada tahun 2005 berjumlah 109 unit dan tahun 2009 masih tetap sebanyak 109 unit.

Banyaknya ruang kelas untuk TK/RA sebanyak 1.066 ruang dan tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 1.182 ruang. Ruang kelas SD/MI pada tahun 2005 sejumlah 3.507 ruang dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan sehingga menjadi 3.645 ruang. Jumlah ruang kelas SMP/MTs pada tahun 2005 ada 936 ruang dan pada tahun 2009 sebanyak 1.246 ruang. Sedangkan ruang kelas SMA/SMK/MA pada tahun 2005 berjumlah 1.001 ruang dan tahun 2009 sebanyak 1.222 ruang.

Jumlah siswa TK/RA pada tahun 2005 sebanyak 23.233 anak dan pada tahun 2009 menjadi 26.120 anak. Siswa SD/MI pada tahun 2005 sejumlah 81.101 anak dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan sehingga menjadi 87.893 anak. Jumlah siswa SMP/MTs pada tahun 2005 ada 36.795 anak dan pada tahun 2009 sebanyak 39.068 anak. Sedangkan siswa SMA/SMK/MA pada tahun 2005 berjumlah 28.335 anak dan tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 32.534 anak.



Rasio murid dan guru di TK/RA pada tahun 2005 yaitu 13 sedangkan pada tahun 2009 menjadi 12. Tahun 2005 rasio murid dan guru SD/MI adalah 15 dan mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 14. Rasio murid dan guru untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2005 yakni 11 dan pada tahun 2009 menjadi 12. Sedangkan untuk SMA/SMK/MA tahun 2005 rasio murid dan guru yaitu 8 dan mengalami kenaikan pada tahun 2009 menjadi 9.

Rasio murid dan sekolah di TK/RA pada tahun 2005 yaitu 42 sedangkan pada tahun 2009 menjadi 51. Tahun 2005 rasio murid dan sekolah untuk SD/MI adalah 153 dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 171. Rasio murid dan sekolah untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2005 yakni 329 dan pada tahun 2009 menjadi 323. Sedangkan untuk SMA/SMK/MA tahun 2005 rasio murid dan sekolah yaitu 272 dan mengalami kenaikan pada tahun 2009 menjadi 298.

Prestasi yang menonjol dalam urusan pendidikan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, antara lain:

- a. Juara I Olimpiade Sains Internasional dari International Mathematic Olympic (IMO)
- b. Juara I Promosi Kopentensi Siswa SMK Bidang Kriya Kulit Tingkat Nasional (2005)
- c. Juara I Lomba Kompetensi Siswa Bidang Peternakan Tingkat Nasional (2006)
- d. Juara I Lomba Kompetensi Siswa SMK Bidang Sekretaris Tingkat Nasional (2006)
- e. Juara I Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional
- f. Juara I Lomba Kompetensi Siswa SMK Bidang Peternakan Tingkat Nasional (2007)
- g. Juara I Lomba Debat Bahasa Inggris Siswa SMK Tingkat Nasional (2008)
- h. Juara I Kepemimpinan dan Bela Negara Siswa SMK Tingkat Nasional (2008)
- i. Juara I Lomba Sekolah Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional (2009)





- j. Juara II Promosi Kopentensi Siswa SMK Bidang aplikasi Elektronika Tingkat Nasional (2005)
- k. Juara II Promosi Kopentensi Siswa SMK Bidang Kriya Kayu Tingkat Nasional (2005)
- l. Juara II Lomba Ketrampilan Siswa SMA Bidang Kriya Tekstil Tingkat Nasional (2007)
- m. Juara II Lomba Kriya Logam siswa SMK Tingkat Nasional (2008)
- n. Juara II Lomba Mekatronika Siswa SMK Tingkat Nasional (2008)
- o. Juara II Lomba Web Design Siswa SMK Tingkat Nasional (2008)
- p. Juara II Bidang Kimia Siswa SMK Tingkat Nasional (2008)
- q. Juara III Lomba Olimpiade Sains SD Bidang Matematika Tingkat Nasional (2008)
- r. Juara III Lomba Olimpiade Sains SMA Bidang Ekonomi Tingkat Nasional (2008)
- s. Juara III Lomba Olimpiade Sains SMA Bidang Cipta Puisi Tingkat Nasional (2008)
- t. Juara III Lomba Kriya Keramik Siswa SMK Tingkat Nasional (2008)
- u. Juara III Lomba Debat Bahasa Inggris SMA Tingkat Nasional (2009)
- v. Juara III Lomba Renang Sekolah Dasar Tingkat Nasional (2009)
- w. Juara III Lomba Karate Sekolah Dasar Tingkat Nasional (2009)
- x. Juara III Lomba Cipta Puisi Balada SMP Tingkat Nasional (2009)

Upaya pembangunan pendidikan ditunjang dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1.	2005	24.582.895.000,00	24.472.979.600,00	99,55%
2.	2006	26.833.593.600,00	23.849.829.778,00	88,88%
3.	2007	43.059.166.850,00	34.612.491.325,00	80,38%
4.	2008	41.918.911.960,00	40.099.718.750,00	95,66%
5.	2009	44.385.042.100,00	39.955.493.361,00	90,00%



Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pendidikan sebesar Rp49.552.805.415,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan :
  - 1) Pembangunan gedung sekolah
  - 2) Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
  - 3) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
  - 4) Pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD)
  - 5) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
  - 6) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD
  - 7) Publikasi dan sosialisasi PAUD
  - 8) Pembinaan gugus dan guru TK
  - 9) Pembinaan akreditasi TK
  - 10) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan usia dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
  - 1) Pengadaan mebelair sekolah
  - 2) Penyediaan bantuan operasional sekolah dasar (BOSDA)
  - 3) Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs
  - 4) Penyelenggaraan paket B setara SMP
  - 5) Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
  - 6) Pelaksanaan tes kendali mutu
  - 7) Lomba gugus SD dan pembinaan guru
  - 8) Penyelenggaraan USEK dan UNAS SD dan SMP
  - 9) Fasilitasi operasional TK/SD model
  - 10) Fasilitasi rehabilitasi gedung (DAK)
  - 11) Pengadaan susu bagi siswa SD/MI (Dinas Tenaga Kerja dan Social)
  - 12) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
  - 1) Pelatihan penyusunan kurikulum
  - 2) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi



- 3) Penyelenggaraan paket C setara SMA
  - 4) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS)
  - 5) Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
  - 6) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
  - 7) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana SMA dan SMK
  - 8) Pendampingan subsidi pembangunan RKB, rehab gedung dan pengadaan peralatan praktek siswa
  - 9) Penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional
  - 10) Pembinaan sekolah andalan dan SSN
  - 11) Pelaksanaan tes kendali mutu SMA dan SMK
  - 12) Study standar kualitas pendidikan dasar (BAPPEDA)
- d. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal
- 1) Pembinaan kursus dan kelembagaan
  - 2) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
  - 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
  - 4) Pembinaan taman bacaan masyarakat (TBM)
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- 1) Pelaksanaan sertifikasi pendidikan
  - 2) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
  - 3) Fasilitasi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran bagi GTT/GTY/Pamong PAUD dan pelaksanaan kerja bagi PTT
  - 4) Pelatihan bagi pendidikan untuk memenuhi standart kompetensi (BKD)
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 1) Pelaksanaan Dewan Pendidikan
  - 2) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
  - 3) Penerimaan peserta didik baru
  - 4) Penilaian kinerja kepala sekolah
  - 5) Penilaian RAPBS
  - 6) Penyusunan regulasi pendidikan
  - 7) Studi kelayakan pendirian satuan pendidikan formal dan non formal
  - 8) Peningkatan kapasitas manajemen pendidikan



g. Program Pengembangan Kreatifitas Siswa dan Guru

- 1) Porsenitas SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
- 2) Pembinaan paduan suara siswa SMA/SMK
- 3) Lomba sekolah sehat dan cerdas cermat dokter kecil
- 4) Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan siswa
- 5) Pameran prestasi hasil karya siswa
- 6) Pemilihan dan pelatihan PASKIBRAKA
- 7) Lomba mendongeng dan pidato bahasa jawa serta cerita gambar seri

Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- a. Masih terdapatnya warga masyarakat yang masih buta huruf
- b. Masih terdapat anak usia 3 – 6 tahun yang belum terlayani dalam lembaga PAUD dan TK
- c. Masih terdapatnya anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
- d. Belum semua pendidik memenuhi standar kualifikasi DIV/S-1
- e. Kurangnya sarana prasarana minimal pada jenjang TK dan SD terutama perpustakaan dan laboratorium serta mebelair

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diatas, dapat ditempuh dengan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan urusan pendidikan di masa mendatang dengan kebijakan, yaitu:

- a. Peningkatan angka melek huruf
- b. Peningkatan kualitas anak-anak usia dini
- c. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan pendidikan 12 tahun
- d. Peningkatan kualitas tenaga pendidik
- e. Peningkatan sarana prasarana pendidikan



## 2. Urusan Kesehatan

Kebijakan pelaksanaan urusan kesehatan di Kabupaten Sleman pada tahun 2005-2010 adalah meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Implementasi atas kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai program yang dilakukan yaitu:

- a. Program Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Program Pengelolaan dan Pengawasan Obat, Makanan, dan Bahan Berbahaya
- c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- d. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
- e. Program Kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan
- f. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
- g. Program Sumberdaya Kesehatan
- h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- i. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- j. Program Peningkatan Pembangunan Kesehatan
- k. Program Pengelolaan Penyediaan Obat dan Kesehatan
- l. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
- m. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- n. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Puskesmas dan RS
- o. Program Peningkatan Manajemen Pembangunan Kesehatan
- p. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- q. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- r. Program Penanggulangan Kemiskinan
- s. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelaksanaan berbagai program kesehatan tersebut mampu meningkatkan indikator pembangunan kesehatan manusia berupa usia harapan hidup,



angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (AKB), angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (AKI) dan Balita dengan gizi buruk, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3.4. Capaian Indikator Pembangunan di Bidang Kesehatan**

No	Indikator	Capaian Kabupaten Sleman					Capaian Nas. 2010
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Usia Harapan Hidup rata-rata	74,6	74,6	74,6	74,6	74,76	-
2	Angka Kematian Bayi/1.000 KH	7,61	7,67	7,67	5,81	4,08	-
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH	69,31	69,31	69,31	69,31	69,31	226
4	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	0,43	0,49	0,49	0,54	0,53	<15
5	Universal Child Immunization/UCI (%)	100	100	100	100	100	100
6	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
7	Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (%)	97,72	97,72	97,21	97,21	91,65	90
8	Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)	74,2	74,2	77,4	77,4	80,7	65
9	Cakupan Air Bersih (%)	96,6	96,6	96,9	96,9	96,1	80
10	Cakupan Jamban Keluarga (%)	65	65	65	66,7	68,4	88
11	Cakupan SPAL (%)	59,0	59,0	59	56	59,1	85

Sumber : Dinas Kesehatan

Dari tabel tersebut diatas pembangunan Kesehatan selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

- Kondisi kesehatan masyarakat salah satunya tercermin dari angka harapan hidup pada tahun 2005 yaitu 74,6 tahun dan pada tahun 2009 yaitu 74,76 tahun, sehingga terjadi peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Sleman yang berarti kondisi derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sleman cukup tinggi apalagi dibanding kondisi kesehatan tingkat propinsi dan Nasional dimana angka harapan hidup tingkat Propinsi 74 tahun dan Nasional 70 tahun,
- Angka kematian bayi di Kabupaten Sleman pada tahun 2005 sebesar 7,61 per 1.000 KH dan pada tahun 2009 sebesar 4,08 per 1.000 KH sehingga terjadi penurunan angka kematian bayi yg sangat signifikan; yang berarti jumlah bayi yang lahir sehat di Sleman lebih besar dan



- kondisinya lebih baik dibanding propinsi sebesar 19 per 1.000 KH dan Nasional sebesar 34 per 1.000 KH,
- c. Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Sleman tahun 2005 sebesar 69,31 per 100.000 KH, sedangkan tahun 2006-2009 belum dilakukan survey. Jika mengacu pada angka tahun 2005, angka kematian ibu melahirkan di Sleman lebih rendah dibanding propinsi sebesar 104 per 100.000 KH dan Nasional sebesar 228 per 100.000 KH,
  - d. Persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Sleman pada tahun 2005 dibandingkan tahun 2009 mengalami peningkatan, pada tahun 2009 terjadi penurunan sebesar 0,01 dibanding tahun 2008. Namun kondisi balita gizi buruk di Kabupaten Sleman lebih rendah dibanding propinsi 0,87 % dan nasional 3 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas gizi anak balita di Kabupaten Sleman lebih baik dibanding propinsi maupun nasional,
  - e. Universal Child Immunization/UCI selama 5 tahun, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebesar 100% yang berarti sudah sesuai standar nasional,
  - f. Balita gizi buruk mendapat perawatan selama 5 tahun, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebesar 100% juga sudah memenuhi standar nasional,
  - g. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, sejak tahun 2005 sampai tahun 2008 sebesar 97,21 % kemudian pada tahun 2009 terjadi penurunan karena kurang kooperatifnya bidan praktek swasta yang seharusnya melaporkan persalinan oleh tenaga kesehatan ke Puskesmas tetapi hal tersebut tidak dilaporkan; namun demikian kondisi selama 5 tahun sudah diatas capaian Nasional 90 %,
  - h. Cakupan Rumah Tangga Sehat tahun 2005 sebesar 74,2 %, kemudian tahun 2007 – 2008 sebesar 77,4 % sehingga terjadi peningkatan yang berarti kesadaran masyarakat akan kesehatan cukup tinggi; walaupun tahun 2009 terjadi penurunan. Namun cakupan Rumah Tangga sehat selama 5 tahun sudah diatas capaian nasional sebesar 65 %,



- i. Cakupan air Bersih Kabupaten Sleman selama 5 tahun sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 naik turunnya cakupan air bersih tidak begitu signifikan namun cakupan selama 5 tahun sudah melebihi cakupan capaian Nasional 80 %. Penurunan cakupan tahun 2009 dibanding tahun 2008 sebesar 0,8 % karena adanya penambahan Kepala Keluarga baru,
- j. Cakupan Jamban Keluarga di Kabupaten Sleman tahun 2005 sebesar 65 % dan pada tahun 2009 sebesar 68,4 % sehingga terjadi peningkatan yang berarti kesadaran masyarakat Kabupaten Sleman untuk hidup bersih dan sehat meningkat walaupun masih dibawah capaian nasional,
- k. Begitu juga untuk cakupan SPAL pada tahun 2005 sebesar 59 % dan pada tahun 2009 sebesar 59,1 terjadi peningkatan walaupun sangat kecil, namun pada tahun 2009 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2008. Kondisi ini masih perlu diusahakan ada peningkatan agar tidak dibawah cakupan Nasional

Dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, berbagai Puskesmas di Kabupaten Sleman pada tahun 2009 telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 yakni Puskesmas Prambanan, Gamping I, Mlati I, Kalasan, Depok I, Mlati II, Minggir, Ngemplak I, Sleman, Godean II, Depok II, Seyegan, dan Godean I, Ngaglik I. Sampai saat ini pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar ISO 9001:2000 sebanyak 14 Puskesmas, 1 Dinas dan 1 RSUD.

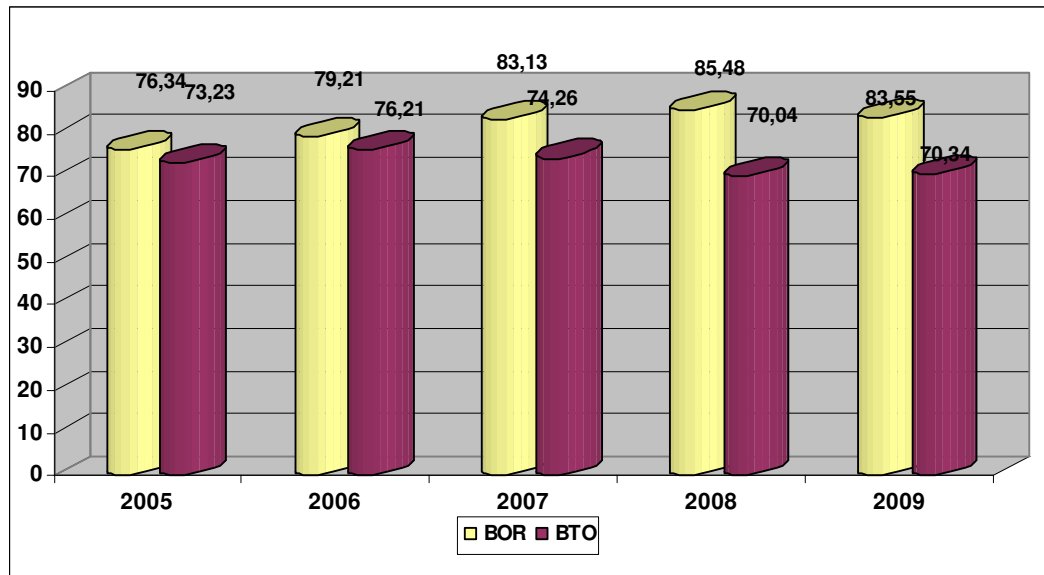
Pelayanan kesehatan di RSUD juga telah memenuhi standar ISO 9001: 2000. Pencapaian indikator pelayanan di RSUD dalam lima tahun terakhir dapat ditunjukkan pada grafik-grafik berikut. Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/*Bed Occupancy Rate* (BOR) mencapai 83,55%, kondisi ini termasuk baik karena kalau dikaitkan standar bahwa BOR dikatakan baik jika realisasinya 70 % - 85 %, walaupun kondisi ideal standard nasional 85%. Frekuensi pemakaian (*Bed Turn Over*) tahun 2009 mencapai 70,34 kali pertahun atau menurun 0,30 dari tahun 2008 yang mencapai 70,04 kali





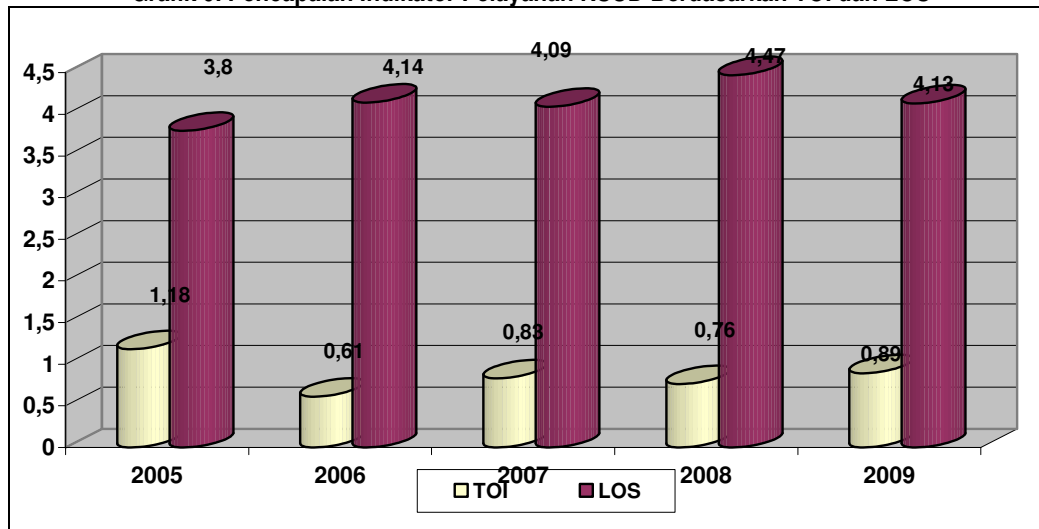
pertahun, namun kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut sudah diatas ideal karena standar ideal pelayanan RS 40 sampai 50 kali.

**Grafik 8. Pencapaian Indikator Pelayanan RSUD Berdasarkan BOR dan BTO**



Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

**Grafik 9. Pencapaian Indikator Pelayanan RSUD Berdasarkan TOI dan LOS**



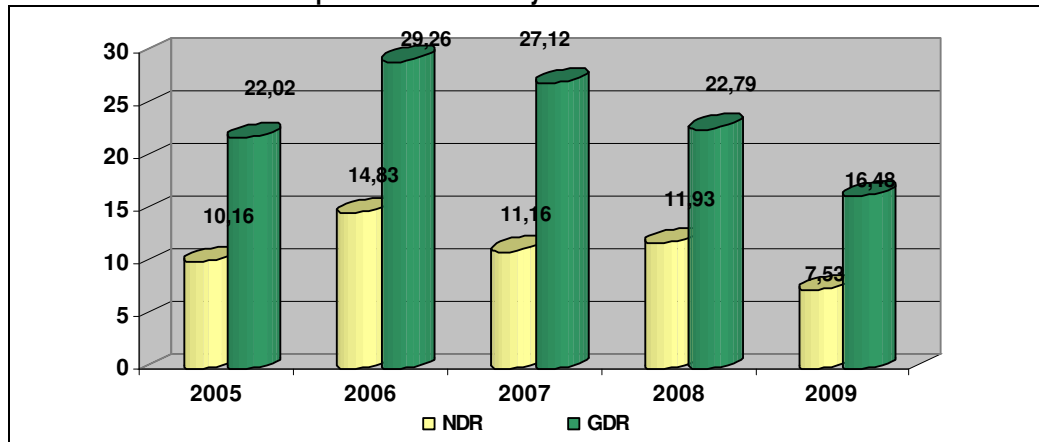
Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Pada tahun 2009 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) mencapai 0,89 hari. Hal ini

memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien sudah mencapai ideal yaitu sesuai standard Departemen Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.

Rata-rata lama perawatan pasien (*Length of Stay*) mencapai 4,13 hari pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai dengan standard nasional lama perawatan 3 - 6 hari.

**Grafik 10. Pencapaian Indikator Pelayanan RSUD Berdasarkan NDR dan GDR**



Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Angka kematian bersih (*Net Death Rate*) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2009 mencapai 7,53 % pasien, mengalami penurunan sebesar 4,40 % pasien dari tahun 2008 yang menunjuk angka 11,93 % pasien. Angka kematian kasar (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit mencapai 22,79 % pasien pada tahun 2008, kemudian menurun pada tahun 2009 menjadi 16,48 % pasien.

Prestasi yang menonjol dalam urusan kesehatan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, antara lain:

2005

- a. Penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada Kartika dari Menteri Kesehatan (2005)
- b. Sertifikasi ISO 9001:2000 Puskesmas dari Societe Generate de Surveillance (SGS)



- c. Penghargaan Tertinggi Ksatria Bhakti Husada Aditya Bidang Pembangunan Kesehatan dari Menteri Kesehatan (2005)
- d. Pengelolaan Terbaik Rumah Sakit Umum Daerah dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2005)
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi peringkat 17 di Tingkat Nasional (2005)
- f. Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Kartika dari Menkes RI (2008)
- g. Sertifikasi ISO 9001:2000 RSUD Sleman dari SGS United Kingdom (2008)
- h. Juara I Lomba Sekolah Sehat SMA/MAN Tingkat Nasional (2008)
- i. Juara III Lomba Sekolah Sehat TK Tingkat Nasional (2008)
- j. Juara II Lomba Sekolah Sehat SMK Tingkat Nasional (2008)
- k. Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Sabna Pradapa dari Menkes RI (2009)
- l. Sertifikasi ISO 9001:2000 RSUD Sleman dari SGS United Kingdom (2009)
- m. Juara I Lomba Sekolah Sehat SMA/MAN Tingkat Nasional (2009)
- n. Juara III Lomba Sekolah Sehat TK Tingkat Nasional (2009)
- o. Juara II Lomba Sekolah Sehat SMK Tingkat Nasional (2009)
- p. Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Sabha Pradapa dari Menkes (2009)
- q. Penghargaan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Ksatria Bhakti Husada Arutala dari Menkes (2009)

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kesehatan dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1.	2005	12.945.491.900	10.364.288.184	80,06
2.	2006	26.833.593.600	23.849.829.778	88,88
3.	2007	67.067.639.580	58.642.594.152	87,43
4.	2008	48.146.971.535	46.816.534.437	97,24
5.	2009	57.966.703.869	53.466.324.530	92,24



Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan kesehatan sebesar Rp58.941.813.875,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Obat dan Perbekalan Masyarakat
  - 1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
  - 2) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
  - 3) Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
  - 4) Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
  - 5) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - 1) Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
  - 2) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
  - 3) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
  - 4) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
  - 5) Perbaikan gizi masyarakat
  - 6) Revitalisasi sistem kesehatan
  - 7) Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
  - 8) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
  - 9) Peningkatan kesehatan masyarakat
  - 10) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
  - 11) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
  - 12) Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
  - 13) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
  - 14) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
  - 15) Fasilitasi premi JPKM pegawai tidak tetap
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
  - 1) Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan



- 2) Peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya
- 3) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
  - 2) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
  - 3) Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
  - 4) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan
  - 5) Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
  - 6) Perencanaan tatanan kawasan sehat
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  - 1) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
  - 2) Pemberian tambahan makanan dan vitamin
  - 3) Penanggulangan kurang gizi protein (KEP). Anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin a dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
  - 4) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
  - 5) Peningkatan gizi lebih
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  - 1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
  - 2) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
  - 3) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  - 1) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
  - 2) Pengadaan alat fogging dan bahan fogging
  - 3) Pengadaan vaksin penyakit menular
  - 4) Pelaksanaan vaksinasi bagi balita, ibu hamil dan anak sekolah
  - 5) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
  - 6) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
  - 7) Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
  - 8) Peningkatan imunisasi
  - 9) Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah



- 10) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 1) Penyusunan standar kesehatan
  - 2) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
  - 3) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
  - 4) Tes kalibrasi alat kesehatan
  - 5) Monitoring evaluasi pengelolaan aset puskesmas
  - 6) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
  - 7) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi RT
  - 8) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- 1) Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
  - 2) Pemberian tambahan makanan dan vitamin
- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbekalan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
- 1) Pengadaan puskesmas keliling
  - 2) Pengadaan sarana prasarana puskesmas
  - 3) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
  - 4) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
  - 5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
  - 6) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu
  - 7) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
  - 8) Rehabilitasi sedang/berat ruang rawat inap puskesmas
  - 9) Penambahan ruang rawat inap RS (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
  - 10) Rehabilitasi bangunan rumah sakit
  - 11) Pengadaan alat-alat rumah sakit
  - 12) Pengadaan obat-obatan rumah sakit
  - 13) Pengadaan mebelair rumah sakit



- 14) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
  - 15) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
  - 16) Pengadaan sarpras rawat inap TB (*Tubercullose*)
  - 17) Pengadaan alat-alat rumah sakit
  - 18) Pengadaan obat-obatan rumah sakit
  - 19) Pengadaan mebelair rumah sakit
  - 20) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
  - 21) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
- k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- 1) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
  - 2) Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
  - 3) Kemitraan pengelolaan limbah medis
- l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- 1) Penyuluhan kesehatan anak balita
  - 2) Imunisasi bagi anak sekolah
- m. Program Peningkatan Kesehatan Lansia
- 1) Pelayanan pemeliharaan kesehatan
  - 2) Pendidikan dan pelatihan perawat kesehatan
  - 3) Pelayanan kesehatan
- n. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- 1) Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
  - 2) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
  - 3) Pengawasan dan pengendalian keamanan kesehatan makanan restoran
- o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dengan penyuluhan bagi ibu hamil dari keluarga yang kurang mampu
- p. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata
- 1) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
  - 2) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
  - 3) Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah



- 4) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair rumah sakit
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

Dalam penyelenggaraan urusan kesehatan sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain:

- a. Masih adanya ancaman penyakit endemis seperti penyakit malaria, demam berdarah (DBD), diare, campak, TBC serta adanya ancaman Leptospirosis. Disamping itu masih banyaknya penyalahgunaan napza yang berdampak terhadap masalah kesehatan.
- b. Rasio bidan dan dokter belum mencukupi.
- c. Perilaku sebagian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang.

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diatas, dapat ditempuh kebijakan bagi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan urusan kesehatan di masa mendatang, yaitu:

- a. Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan lingkungan bagi masyarakat
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
- d. Peningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

### **3. Urusan Lingkungan Hidup**

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup pada tahun 2005-2010 Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu :

- a. Menjaga dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat.
- b. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat.

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam berbagai program kegiatan antara lain sebagai berikut :





- a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- c. Peningkatan Pengendalian Polusi.
- d. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).
- e. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam.
- f. Penataan dan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan tersebut mampu mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) mencapai hasil yang cukup menggembirakan dengan indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.6. Data Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman**

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Kasus pencemaran/kerusakan lingkungan					
	• Tanah	5	3	0	0	3
	• Air	11	8	6	5	12
	• Udara	14	10	14	20	12
2.	Jumlah usaha yang wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan					
	• Amdal	1	1	4	0	0
	• UKL/UPL	43	49	40	61	76
	• SPPL	405	459	753	978	1.549
3	Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan					
	• Amdal	1	1	0	0	0
	• UKL/UPL	30	40	35	50	60
	• SPPL	405	459	753	978	1.549
4	Perusahaan yang mempunyai IPAL	68	70	72	78	93
5	Pengelolaan sampah mandiri	8	21	34	44	52

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup

Kesadaran masyarakat atau pengusaha untuk mengelola lingkungan pada usaha dan kegiatan yang dilakukan semakin meningkat. Hal ini terbukti dari banyaknya dokumen UKL-UPL dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), pada tahun 2009 sebanyak 1.609 dokumen atau meningkat 273 % jika dibandingkan dengan tahun 2005 sebanyak 431 dokumen.



Pengolahan sampah sejak dari sumbernya sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah berjalan baik di Kabupaten Sleman. Hal ini terlihat dari perkembangan kelembagaan pengelola sampah mandiri di tingkat padukuhan. Sampai tahun 2009 kelembagaan pengelolaan sampah mandiri sebanyak 52 lembaga, meningkat 550 % dari tahun 2005 sebanyak 8 lembaga.

Dalam rangka melindungi sumber air minum telah dikembangkan sanitasi berbasis masyarakat sampai dengan tahun 2009 berjumlah 9 unit di 5 lokasi, (5 unit IPAL komunal di Sukunan, Banyuraden, Gamping; 1 unit MCK plus di Jetak II, Sidokarto, Godean; 1 unit IPAL komunal di Minomartani, Ngaglik, 1 unit MCK plus di Blunyahgede, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati dan 1 unit IPAL komunal di Dusun Santan, Maguwoharjo, Depok).

Berdasarkan data tahun 2005 perusahaan yang telah memiliki IPAL berjumlah 68 perusahaan dari 91 perusahaan yang wajib memiliki IPAL, jumlah tersebut bertambah menjadi 78 perusahaan yang memiliki IPAL dari 101 perusahaan yang wajib memiliki IPAL pada tahun 2009. Sedangkan untuk perusahaan perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan, pada tahun 2005 berjumlah 435 dari 449 perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan, jumlah tersebut bertambah menjadi 1.604 perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan dari 1.625 perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan pada tahun 2009.

Berbagai program dan kegiatan urusan lingkungan hidup mampu mendukung pencapaian kualitas udara sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.7. Hasil Pemeriksaan Kualitas Udara**

Kandungan Udara	Kualitas Udara			Angka Ambang Batas
	Tahun 2005	Tahun 2009		
Sulfur dioksida	0,0003 – 0,0211 ppm	0,0020 – 0,0109 ppm	0,340 ppm	
Karbon monoksida	6,04 ppm	0,03-0,94 ppm	35 ppm	
Nitrogen dioksida	0,0017 – 0,0521 ppm	0,0193 – 0,0702 ppm	0,212 ppm	
Hidro Carbon (HC)	100,95 – 118,42 µg/m <sup>2</sup>	30 – 145 µg/m <sup>2</sup>	160 µg/m <sup>2</sup>	
Timah hitam (Pb)	0,109 – 1,9 µg/m <sup>2</sup>	0,021 – 0,817 µg/m <sup>2</sup>	2 µg/m <sup>2</sup>	
Partikel debu	27,34 – 199,853 µg/m <sup>2</sup>	9,820 – 214,207 µg/m <sup>2</sup>	230 µg/m <sup>2</sup>	

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup



Penilaian terhadap kualitas udara melalui Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) diperoleh berdasarkan pemeriksaan selama 1 jam di 26 lokasi pemantauan kualitas udara ambient Program Langit Biru di wilayah Kabupaten Sleman yang meliputi parameter SO<sub>2</sub>, Co, NO<sub>2</sub>, HC, O<sub>3</sub>, TSP dan Pb yang hasilnya telah memenuhi Baku Mutu Udara Ambien, meskipun waktu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan belum sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 tahun 2002 kecuali untuk parameter NO<sub>2</sub>, untuk parameter lainnya masih memenuhi baku mutu udara ambient untuk pengujian 1 jam.

Dalam upaya menjaga kualitas air telah dilakukan pengujian air di 25 titik lokasi setiap tahunnya. Dari hasil uji kualitas dapat disimpulkan bahwa parameter kimia semua titik sampel memenuhi persyaratan kualitas air bersih. Namun demikian di sisi lain, banyaknya pembuangan sampah liar di sepanjang sungai serta pembuangan limbah rumah tangga atau limbah dari kegiatan pertanian, peternakan, dan industri yang dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu, mengakibatkan kualitas 3 sungai besar PROKASIH di wilayah Kabupaten Sleman tidak memenuhi baku mutu untuk sungai kelas II, disamping peningkatan kasus pencemaran lingkungan. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain:

- a. Pembangunan IPAL Komunal untuk limbah rumah tangga maupun limbah industri kecil
- b. Pembangunan jaringan pembuangan limbah rumah tangga ke IPAL Sewon
- c. Mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan *reduse, reuse, dan recycle*
- d. Gerakan PROKASIH
- e. Penegakan hukum dalam bentuk pemberian sanksi administrasi kepada usaha kegiatan yang membuang limbah tanpa diolah, penangkapan pembuang sampah ilegal bekerjasama dengan Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat, Dinas Kimpraswihub, kecamatan, dan masyarakat



Prestasi dan penghargaan di tingkat nasional yang diraih Kabupaten Sleman dalam urusan lingkungan hidup antara lain meliputi :

- a. Juara II tingkat nasional Petugas Kehutanan Lapangan (PKL) atas nama Jumali, PKL Kecamatan Cangkringan (Tahun 2006).
- b. Piala Adipura kategori Kota Sedang (Tahun 2007).
- c. Peraih Adiwiyata Tingkat nasional kategori sekolah berwawasan lingkungan diraih oleh SD Kanisius Kalasan (Tahun 2007).
- d. Peraih penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan diraih oleh Kelompok Tani Mandiri, Dusun Nganggring, Girikerto, Turi (Tahun 2007).
- e. Juara Nasional nominator madya sekolah berwawasan lingkungan hidup (Adiwiyata) diraih oleh SD Kanisius Kalasan . (Tahun 2008)
- f. Juara Nasional madya tahun ketiga sekolah berbudaya lingkungan (Adiwiyata) diraih oleh SD Kanisius Kalasan (Tahun 2009).
- g. Juara Nasional tahun pertama sekolah berbudaya lingkungan (Adiwiyata) diraih SD Negeri Nogopuro, Caturtunggal, Depok (Tahun 2009).

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup didukung dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

**Tabel 3.8. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1.	2005	2.966.378.500,00	2.883.616.540,00	97,21
2.	2006	1.375.204.000,00	1.277.960.472,00	92,93
3.	2007	1.674.878.000,00	1.618.223.733,00	96,62
4.	2008	7.247.563.500,00	6.636.088.404,00	91,56
5.	2009	2.210.005.500,00	2.008.708.000,00	90,89

Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebesar Rp7.654.007.950,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - 1) Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan
  - 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan



- 3) Kerjasama pengelolaan persampahan di RSUD Sleman dan RSUD Prambanan
  - 4) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
  - 5) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
  - 6) Bimbingan teknis persampahan
  - 7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
  - 8) Kerjasama pengelolaan persampahan dengan swedia
  - 9) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 1) Koordinasi penilaian kota sehat
  - 2) Pemantauan kualitas lingkungan
  - 3) Pengelolaan B3 dan limbah B3
  - 4) Pengkajian dampak lingkungan
  - 5) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)
  - 6) Koordinasi pengelolaan PROKASIH/SUPERKASIH
  - 7) Pengembangan produksi ramah lingkungan
  - 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan
  - 9) Fasilitasi permasalahan lingkungan hidup
  - 10) Pelayanan perijinan bidang lingkungan hidup
  - 11) Penyusunan strategi sanitasi perkotaan
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 1) Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
  - 2) Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
  - 3) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
  - 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
  - 5) Fasilitasi program kampung hijau
  - 6) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
  - 7) Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan lingkungan



- 8) Pengendalian kerusakan hutan dan lingkungan
- 9) Penanaman sepadan sungai
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
- e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
  - 1) Pengujian emisi kendaraan bermotor
  - 2) Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
  - 3) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
  - 4) Pengadaan sarana teknis pengujian kualitas lingkungan
  - 5) Pengujian emisi kendaraan bermotor di RSUD Sleman dan RSUD Prambanan
  - 6) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair di RSUD Sleman dan RSUD Prambanan
  - 7) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
- f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
  - 1) Penataan ruang terbuka hijau
  - 2) Pemeliharaan ruang terbuka hijau
  - 3) Pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau
  - 4) Studi lokasi taman dan hutan kota
  - 5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup antara lain:

- a. Meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan yang berakibat terjadinya degradasi lingkungan
- b. Belum ada Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.



Upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diatas, dapat ditempuh kebijakan bagi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan urusan lingkungan di masa mendatang, yaitu:

- a. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta meningkatkan konservasi sumber daya alam.
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan.
- c. Penyusunan produk hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta peningkatan penegakan hukum .
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pengendalian lingkungan.

#### **4. Urusan Pekerjaan Umum**

Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum pada tahun 2005 – 2010 Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu :

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perhubungan dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang.
- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pengairan dengan memperhatikan konservasi sumber daya air melalui peningkatan peran serta masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan.
- d. Mewujudkan kualitas lingkungan yang terjaga dan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat.

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam berbagai program kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.
- b. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya .



- c. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman.
- e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan tersebut mampu mendukung keberhasilan pembangunan pekerjaan hidup selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) mencapai hasil yang cukup menggembirakan dengan indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.9. Data Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman**

NO	Keterangan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jalan Kabupaten (m)					
	a. Baik	372,9	379,26	313,03	314,33	339,63
	b. Sedang	440,5	415	436,1	428,95	418,40
	c. Rusak	252,9	267	304	308,15	305,40
	d. Rusak Berat	18,83	24	32	33,7	21,70
2.	Jembatan (buah)					
	a. Baik	265	270	244	252	259
	b. Sedang	118	114	119	119	114
	c. Rusak	72	61	62	74	72
3.	Bendung (buah)					
	a. Bendung teknis/permanen	945	945	954	954	954
	b. Bendung semi permanen	132	196	196	196	205
	c. Bendung sederhana	1.350	951	942	942	923
4.	Kondisi Bendung Permanen (buah)					
	a. Baik	400	404	432	451	451
	b. Sedang	280	280	280	280	280
	c. Rusak	265	261	233	235	235
5.	Kondisi Bendung Semi Permanen (buah)					
	a. Baik	60	93	95	116	135
	b. Sedang	40	55	46	46	46
	c. Rusak	32	48	64	43	24
6.	Kondisi Saluran Irigasi Primer (meter)					
	a. Baik	140.793	144.701	148.797	241.521	247.000
	b. Sedang	104.043	104.043	104.043	97.392	93.367,1
	c. Rusak	101.975	98.067	93.971	7.898	5.444





1	2	3	4	5	6	7
7.	Kondisi Saluran Irigasi Sekunder (meter)					
	a. Baik	168.614	171.819	172.886	290.230	297.622
	b. Sedang	126.600	126.600	126.600	127.847	120.455
	c. Rusak	126.600	122.975	121.908	3.317	3.317
8.	Kondisi Sarpras Pembuangan Sampah					
	a. Tempat/Lokasi Pembuangan Akhir (TPA)	1	1	1	1	1
	b. Luas TPA (ha)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	c. TPS (buah)	71	71	80	129	169
	d. LDUS	4	4	4	2	2
	e. Transfer Depo	7	7	7	8	8
	f. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA (m <sup>3</sup> /hari)	288,00	300,00	257,69	315,00	340,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral

Kondisi prasarana perhubungan berupa jalan dan jembatan pada tahun 2005 cukup baik namun masih terdapat 262,75 km jalan dengan kondisi rusak (termasuk jalan belum beraspal sepanjang 260,6 km), 7,95 km jalan dengan kondisi rusak berat, dan 72 buah jembatan dengan rusak berat. Jalan kondisi baik tahun 2009 sepanjang 339,63 m mengalami penurunan -8,92% jika dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu sepanjang 372,9m. Kondisi tersebut juga berlaku sama pada kondisi jembatan yaitu jembatan kondisi baik tahun 2005 berjumlah 265 buah dan mengalami penurunan sebesar -2,27% di tahun 2009 yaitu 259 buah .

Kondisi sarana pengairan dari tahun 2005 – 2009 juga cenderung mengalami penurunan sebagaimana terlihat dari beberapa indikator antara lain jumlah bendung yang terdiri dari bendung permanen, semi permanen dan sederhana tahun 2005 berjumlah 2.427 buah mengalami penurunan -14,21 di tahun 2009 yaitu 2.082 buah. Akumulasi penurunan jumlah bendung diakibatkan oleh penurunan tajam jumlah bendung sederhana dari tahun 2005 berjumlah 1.350 buah menjadi 923 buah atau -31,63. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya bencana gempa bumi DIY dan sekitarnya tahun 2006 yang berakibat terhadap rusaknya prasarana wilayah.



Jumlah bendung permanen dengan kondisi baik tahun 2005 berjumlah 400 buah meningkat sebesar 12,75% di tahun 2009 menjadi 451 buah, sedangkan bendung permanen dengan kondisi rusak tahun 2005 berjumlah 265 buah mengalami penurunan sebesar 12,77% di tahun 2009 menjadi 235 buah. Jumlah TPS mengalami peningkatan 138,02% dari tahun 2005 berjumlah 71 buah menjadi 69 buah di tahun 2009.

Berkaitan dengan penyediaan Taman Pemakaman Umum, sampai dengan tahun 2009 telah tersedia dan terselenggara 1 lokasi Taman Pemakaman Umum seluas 5 ha yang mampu menampung 5.484 srm (satuan ruang makam).

Prestasi dan penghargaan di tingkat nasional yang diraih Kabupaten Sleman dalam urusan pekerjaan umum antara lain meliputi:

- a. Juara I lomba P3A tingkat nasional untuk bidang pembangunan dan administrasi keuangan diraih oleh P3A Tirto Mulyo Turi (Tahun 2008)
- b. Juara III lomba P3A tingkat nasional diraih oleh P3A Bangunkerto Turi (Tahun 2009)
- c. Penghargaan nasional kategori Perkumpulan Petani Pemakai Air dari Menteri Pertanian kepada Tarminanto Ketua P3A Bangunkerto Turi (Tahun 2009)

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum didukung dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

**Tabel 3.10. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum**

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1.	2005	22.439.380.000,00	15.763.471.763,00	70,25
2.	2006	26.945.325.200,00	20.284.621.891,00	75,28
3.	2007	29.754.155.083,00	26.960.015.164,00	90,61
4.	2008	35.579.447.400,00	30.508.785.312,00	85,75
5.	2009	52.731.296.362,00	47.201.745.681,00	89,51



Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum sebesar Rp48.182.671.000,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - 1) Peningkatan jalan
  - 2) Peningkatan jembatan dan gorong-gorong
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
  - 1) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
  - 2) Pemeliharaan rutin saluran drainase
  - 3) Penyusunan master plan drainase di kawasan perkotaan
- c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - 1) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
  - 2) Pemeliharaan rutin jalan
  - 3) Pemeliharaan rutin jembatan
  - 4) Pengadaan aspal swadaya
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
  - 1) Operasional/pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan
  - 2) Operasional/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
- e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah
  - 1) Fasilitasi pembinaan teknis pengelolaan air limbah
  - 2) Perencanaan jaringan air limbah
  - 3) Penyediaan prasarana dan sarana air bersih
  - 4) Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi
  - 5) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum dan reservoir di RSUD Sleman dan RSUD Prambanan
- f. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
  - 1) Pembangunan jalan dan jembatan desa
- g. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
  - 1) Perencanaan gedung
  - 2) Pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah
  - 3) Pembangunan dan pemeliharaan kantor kecamatan



- 4) Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum
- 5) Pembinaan teknis pembangunan
- h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
  - 1) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
  - 2) Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
  - 3) Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi
  - 4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
  - 5) Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif
  - 6) Pembinaan perijinan bidang irigasi
  - 7) Pemutakhiran data jaringan irigasi
  - 8) Peningkatan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan irigasi
- i. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
  - 1) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
  - 2) Pembinaan dan pengelolaan air baku
- j. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
  - 1) Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
  - 2) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung lainnya
  - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
  - 4) Perencanaan embung dan bangunan penampung air lainnya
  - 5) Inventarisasi pelanggaran sempadan sungai
  - 6) Pembuatan bangunan konservasi sipil teknis

Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum antara lain:

- a. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana wilayah masih kurang, sehingga laju kerusakan berbagai prasarana wilayah lebih cepat dari umur yang direncanakan.



- b. Bertambahnya produksi sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya dunia usaha.
- c. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas fasilitas publik antara lain taman kota, pemakaman, fasilitas olahraga.

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diatas, dapat ditempuh kebijakan bagi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di masa mendatang, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas prasarana wilayah sesuai dengan prioritas kegunaan
- b. Meningkatkan sarana, prasarana dan pengelolaan sampah
- c. Menambah kualitas dan kuantitas fasilitas publik

## **5. Urusan Penataan Ruang**

Dalam penyelenggaraan urusan penataan ruang selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yang efektif dan efisien dengan peran serta masyarakat dan swasta.

Kebijakan tersebut terimplementasi dalam program sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Tata Ruang.
- b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Dalam pelaksanaan urusan penataan ruang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diarahkan untuk mewujudkan visi penataan ruang yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, nyaman untuk menjalankan aktivitas dalam suasana yang tenang dan damai, produktif sehingga proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, dan berkelanjutan dalam mempertahankan kualitas lingkungan fisik untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan urusan penataan ruang mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang penataan



ruang selama kurun waktu 2005-2009 antara lain telah dihasilkan dokumen perencanaan tata ruang, baik yang bersifat umum maupun rencana detail dan teknis.

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang telah disusun mencakup kurang lebih sebesar 16,17% dari luas wilayah Kabupaten Sleman. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah mencapai kurang lebih 49,73% dari luas wilayah Kabupaten Sleman.

Adapun rincian RUTR dan RDTR yang telah disusun sebagai berikut :

**Tabel 3.11. Rencana Umum Tata Ruang yang telah disusun**

No.	Lokasi	Luas Perencanaan (Ha)
1.	Kalasan	376,3335
2.	Tempel	657,7490
3.	Pakem	265,5000
4.	Sleman	3.132,0000
5.	Prambanan	147,5200
6.	Godean	558,4090
7.	Ngaglik	286,5537
8.	Mlati	363,2000
9.	Berbah	2.054,9500
10.	Turi	415,7495
11.	Ngemplak	371,1439
12.	Seyegan	308,7675
13.	Cangkringan	172,5485
<b>Jumlah</b>		<b>9.354,4746</b>

Sumber : Bappeda

**Tabel 3.12. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan yang telah disusun**

No.	Lokasi	Luas Perencanaan (Ha)
1.	Kalasan	3.584,0000
2.	Depok	1.693,3565
3.	Moyudan	2.762,0000
4.	Minggir	254,5825
5.	Pakem	283,8250
6.	Sleman	2.419,3275
7.	Gamping	2.925,0000
8.	Prambanan	1.707,0000
9.	Ngaglik	3.852,0000
10.	Mlati	2.852,0000
11.	Ngemplak	3.571,0000
12.	Godean	2.684,0000
<b>Jumlah</b>		<b>28.588,0915</b>

Sumber : Bappeda



Wilayah Kabupaten Sleman yang diprediksikan menjadi kawasan pertumbuhan baru telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Sampai tahun 2009 kawasan yang telah disusun RTBL adalah kawasan Stadion Maguwoharjo, Babarsari, Museum Gunung Merapi, Selokan Mataram, Jl. Solo, Jl. Monjali, Kota Prambanan, Kota Tempel, Wisata Kaliadem, Wisata Petualang Gunung Bangkel dan Perkantoran Kabupaten Sleman, Kecamatan Berbah.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang**

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1.	2005	373.000.000,00	321.122.700,00	86,09%
2.	2006	2.126.509.470,00	1.781.987.320,00	83,80%
3.	2007	2.553.900.000,00	2.162.816.100,00	84,67%
4.	2008	3.789.850.000,00	2.356.080.150,00	62,17%
5.	2009	3.365.126.000,00	2.535.486.300,00	82,42%

Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang sebesar Rp2.242.632.000,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tata Ruang
  - 1) Fasilitasi dan koordinasi tentang tata ruang daerah
  - 2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perdesaan
  - 3) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perkotaan
  - 4) Penyusunan master plan minapolitan Kab. Sleman
  - 5) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
  - 6) Survei dan pemetaan
- b. Program Pemanfaatan Ruang
  - 1) Penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - 1) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
  - 2) Pengawasan pemanfaatan ruang



- 3) Pelayanan perijinan IMB
- 4) Pelayanan ijin reklame
- 5) Pelayanan ijin pembangunan menara seluler
- 6) Pelayanan ijin rencana tapak dan surat keterangan rencana kabupaten (SKRK)

Dalam penyelenggaraan urusan penatan ruang masih dijumpai permasalahan, yaitu dokumen revisi atas peraturan daerah tentang RTRW 1994-2004 belum tersedia mengingat draf dokumen RTRW yang telah disusun masih terkendala oleh terbitnya ketentuan acuan yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada awal tahun 2010.

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan penataan ruang pada masa yang akan datang, dapat direkomendasikan kebijakan strategis 5 tahun ke depan sebagai berikut :

- a. Mempercepat proses legislasi Raperda RTRW.
- b. Mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan sebagai acuan pengendalian tata ruang.
- c. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penataan dan pengendalian tata ruang.

## **6. Urusan Perencanaan Pembangunan**

Dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah
- b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat/lembaga untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemberian stimulan dan penerapan Iptek





Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Program pengendalian pembangunan
- c. Program Peningkatan Kerjasama

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun melalui empat tahapan, yaitu :

- a. penyusunan rencana,
- b. penetapan rencana,
- c. pengendalian pelaksanaan rencana,
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Dalam tahapan tersebut juga melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Keempat tahapan proses perencanaan pembangunan tersebut telah dilakukan di Kabupaten Sleman dan berjalan relatif baik dan tepat waktu. Proses perencanaan pembangunan diawali dari Musyawarah pembangunan desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Dengan dilakukannya proses tersebut diharapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Sleman dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal.

Pada tahun 2005 penyusunan perencanaan pembangunan belum memiliki acuan. Dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, yaitu POLDAS dan PROPEDA telah habis masa berlakunya pada tahun 2004. Penyusunan dokumen



perencanaan sebagai pengganti dokumen perencanaan yang sudah habis masa berlakunya dilakukan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada 2005 dilantik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2005 menggunakan dasar dokumen perencanaan POLDAS dan Propeda tahun 2000-2004, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam pelaksanaan pembangunan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman telah menyusun ketiga dokumen perencanaan tersebut, yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006-2025, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 14/Per.Bup/2005;
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, ditetapkan dengan peraturan Bupati :
  - 1) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Tahun 2005,
  - 2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2006, Nomor: 17/Per.Bup/2005,
  - 3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2007, Nomor:10/Per.Bup/2006,
  - 4) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2008, Nomor:12/PerBup/2007
  - 5) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2009, Nomor: 7 Tahun 2008,
  - 6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2010, Nomor: 11 Tahun 2009.



Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.14. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan**

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1.	2005	3.469.863.200,00	2.619.516.370,00	75,00%
2.	2006	3.463.344.350,00	2.996.973.350,00	86,53%
3.	2007	6.041.238.430,00	4.968.265.972,00	82,24%
4.	2008	6.028.165.860,00	5.256.031.603,00	87,19%
5.	2009	6.147.540.100,00	5.376.031.520,00	87,00%

Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sebesar Rp4.113.186.600,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Kerjasama Pembangunan
  - 1) Peninjang sekber kartamantul
  - 2) Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah yang berkelanjutan untuk desentralisasi yang berkelanjutan (tahun terakhir)
  - 3) Koordinasi kerjasama antar daerah berbatasan
  - 4) Fasilitasi penyusunan naskah kerjasama pemerintah daerah dan desa
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 1) Penyusunan RPJMD
  - 2) Penyusunan RKPD 2011
  - 3) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
  - 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan capaian sasaran program
  - 5) Penyusunan KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara
  - 6) Perencanaan dan monitoring dana DAK
  - 7) Perencanaan dan monitoring dana tugas pembantuan dan desentralisasi
  - 8) Fasilitasi penyusunan renstra SKPD
  - 9) Penyusunan analisis dampak kependudukan



- 10) Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
  - 11) Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban
  - 12) Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah akhir masa jabatan
  - 13) Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan
  - 14) Perumusan kebijakan evaluasi pelaksanaan pembangunan
  - 15) Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah kabupaten, penetapan kinerja pemkab dan evaluasi LAKIP
  - 16) Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan dilaksanakan di 17 kecamatan
  - 17) Pengendalian pembangunan kecamatan dilaksanakan di 17 kecamatan
- c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 1) Penyusunan master plan pengembangan pariwisata kawasan ratu boko, candi ijo dan rumah dome
  - 2) Rencana induk pengembangan industri UMKM
  - 3) Penyusunan rencana induk pengembangan investasi
  - 4) Fasilitasi pengembangan komoditas pertanian potensial di wilayah sleman timur
- d. Program Pengembangan Data/Informasi
- 1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
  - 2) Penyusunan data program pembangunan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan
  - 3) Pengolahan dan updating data sistem informasi manajemen pemerintahan desa
- e. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 1) Koordinasi pengembangan wilayah strategis di Kec. Moyudan, Kec. Mlati, Kec. Prambanan, Kec. Kalasan, Kec. Pakem, Kec. Cangkringan
  - 2) Koordinasi pengembangan wilayah strategis dan tumbuh cepat di Kec. Minggir



Namun demikian selama melaksanakan kebijakan tersebut masih dijumpai kekurangan atau kelemahan, yaitu kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masih kurang.

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan 5 tahun ke depan yaitu :

- a. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengartikulasikan kebutuhannya.
- c. Meningkatkan keterpaduan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

## **7. Urusan Perumahan**

Kondisi pembangunan perumahan pada tahun 2005 relatif baik namun demikian masih ditemui permasalahan mendasar yaitu prasarana dasar permukiman yang kurang baik, rumah tidak layak huni masih cukup banyak, tempat pemakaman umum bagi perumahan yang terbatas. Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka dalam penyelenggaraan urusan perumahan tahun 2005-2009, Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan.

Kebijakan tersebut terimplementasi dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman.
- b. Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum.
- e. Pengembangan dan Pengelolaan Areal Pemakaman.



Pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan tersebut mampu mendukung keberhasilan pembangunan perumahan selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) mencapai hasil yang cukup menggembirakan, dengan indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.15. Data Perumahan Kabupaten Sleman**

NO	Keterangan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Stimulan Pemugaran Rumah	195	1.072	2.181	3.289	4.450
2.	Jumlah rusunawa (twin block)	-	1	2	2	6
3.	Pembangunan lingkungan permukiman					
	- Drainase (m)	1.088	972	1.760	1.764	650
	- Jalan lingkungan (m <sup>2</sup> )	13.432	14.420	700	75.150	21.184

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Penyediaan sarana dan prasarana perumahan masyarakat kurang mampu diwilayah perkotaan cukup berhasil. Hal ini terlihat dengan dibangunnya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebanyak 6 twin block beserta prasarana dasarnya di Dusun Mranggen, Sinduadi, Mlati dan Dusun Dabag, Condongcatur, Depok.

Rehabilitasi rumah yang layak bagi masyarakat miskin telah dilakukan sejak tahun 2005 yaitu dengan diberikan bantuan semen dan pemugaran/bedah rumah. Sampai tahun 2009 telah dilaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin sebanyak 11.187 rumah.

Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman dalam lima tahun terakhir cukup berhasil. Salah satunya dengan telah selesai pembangunan tempat pemakaman umum (TPU) di Desa Margodadi Seyegan seluas 5,5 ha. TPU sangat diperlukan bagi masyarakat yang tinggal di perumahan, karena masyarakat perumahan yang meninggal sering tolak mengubur ditempat pemakaman warga setempat. Disamping itu juga keberhasilan dalam pembangunan jalan-jalan lingkungan secara swadaya. Keberhasilan tersebut didukung dengan stimulan bantuan dari pemerintah kabupaten berupa dana



dan aspal, ketersediaan material yang cukup melimpah dan semangat gotong-royang masyarakat yang masih besar.

Berbagai upaya dalam urusan perumahan tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga diapresiasi dengan mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Prestasi dan penghargaan yang diraih Kabupaten Sleman dalam urusan perumahan adalah Peringkat I tingkat nasional Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) tahun 2007 untuk Bidang Cipta Karya Sub Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Penyelenggaraan urusan perumahan dari tahun 2005-2010 didukung dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

**Tabel 3.16. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Perumahan**

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1.	2005	33.408.676.900,00	29.516.566.096,00	88,35
2.	2006	32.188.412.620,00	29.844.172.045,00	92,72
3.	2007	51.501.189.480,00	40.757.732.724,00	79,14
4.	2008	47.252.262.106,00	34.477.447.961,00	72,96
5.	2009	37.771.260.000,00	27.041.841.098,00	71,59

Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan perumahan sebesar Rp2.480.122.000,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan
  - 1) Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa/rusunami
  - 2) Pengelolaan rusunawa/rusunami
- b. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
  - 1) Pemberian perijinan pemakaman
  - 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
  - 3) Perencanaan tempat pemakaman umum
- c. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran di RSUD Sleman dan RSUD Prambanan



- 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- 3) Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
- 4) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
- 5) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
- 6) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Dalam penyelenggaraan urusan perumahan sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan perumahan antara lain:

- a. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana permukiman masih kurang.
- b. Pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman.
- c. Rumah tidak layak huni masih cukup banyak.

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diatas, dapat ditempuh kebijakan bagi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan urusan pendidikan di masa mendatang, yaitu:

- a. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana permukiman.
- b. Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan.
- c. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu melalui pemberian stimulan.

## **8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Dalam penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olah Raga selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu :

- a. Meningkatkan potensi generasi muda dengan mengembangkan kesempatan pendidikan ketrampilan, kewirausahaan, prestasi olah raga, kebugaran dan kesegaran jasmani masyarakat dengan fasilitas prasarana





olah raga yang memadai serta melindungi generasi muda dari penyimpangan nilai-nilai moral.

- b. Mengembangkan prestasi olahraga, kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat dengan difasilitasi prasarana olah raga yang memadai

Kebijakan tersebut terimplementasi dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatkan Pembinaan Generasi Muda
- b. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Olah Raga
- c. Peningkatan Kualitas Pembinaan Olah Raga

Pelaksanaan berbagai program tersebut mampu mendukung keberhasilan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) mencapai hasil yang cukup menggembirakan dengan indikator sebagai berikut :

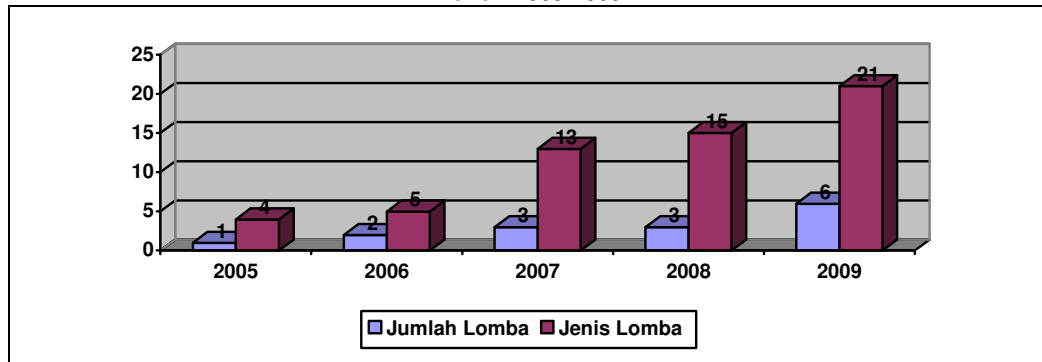
**Tabel 3.17. Data Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009**

No	Keterangan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Penyelenggara lomba					
	a.Jumlah lomba	1	2	3	3	6
	b.Jenis lomba	4	5	13	15	21
2.	Pembinaan Pemuda					
	a. Kelompok Usaha Pemuda Produktif	2	5	-	-	-
	b. Lembaga Kepemudaan yang dibina	1	1	8	28	28
3.	Pembinaan Karang Taruna	86	104	104	104	104

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Perkembangan penyelenggaraan lomba kepemudaan dan Olah Raga dari tahun 2005 sampai 2009 cenderung meningkat dari data yang ada pada tahun 2005 berjumlah 1 lomba, naik menjadi 6 pada tahun 2009. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan jumlah jenis lomba dari 4 jenis menjadi 21 jenis.

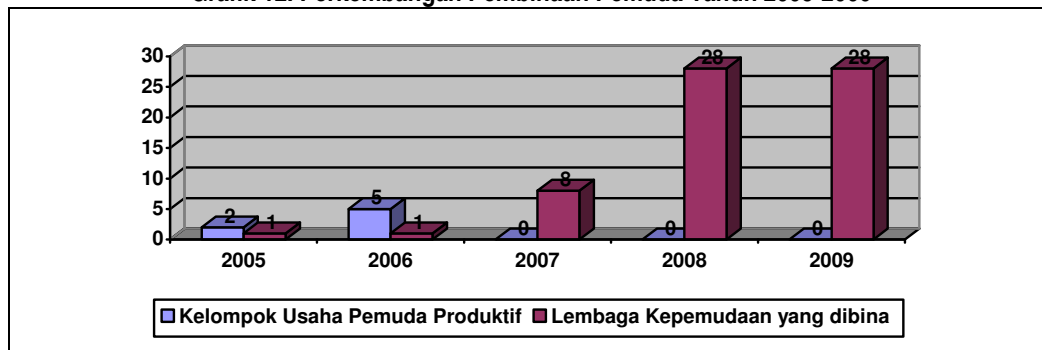
**Grafik 11. Perkembangan Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2005-2009**



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Perkembangan bidang pembinaan pemuda untuk kelompok usaha pemuda produktif dari 2 kelompok, kemudian tahun 2006 naik menjadi 5 kelompok. Pembinaan lembaga kepemudaan yang dibina pada tahun 2005 hanya 1 lembaga, kemudian meningkat menjadi 28 lembaga di tahun 2009, karena peningkatan ini dipicu oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas Generasi Muda dalam mengaktualitaskan segenap potensi diri dengan melalui organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.

**Grafik 12. Perkembangan Pembinaan Pemuda Tahun 2005-2009**



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Berbagai upaya dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga, tidak hanya meningkatkan kualitas Generasi Muda dan Masyarakat, tetapi juga diapresiasi dengan mendapatkan penghargaan tingkat provinsi maupun nasional. Prestasi menonjol yang diraih Kabupaten Sleman dalam urusan kepemudaan dan Olahraga antara lain meliputi :



- a. Juara V lomba Porseni Pondok Pesantren Tingkat Nasional (Tahun 2005)
- b. Juara I POPNAS di Medan, atas nama Puji Rahayu siswa SMP Negeri 1 Minggir (Tahun 2005)
- c. Juara III Bola Basket Tingkat Nasional (Tahun 2006)
- d. Juara III Bola Volli Putra dan Putri Tingkat Nasional (Tahun 2006)
- e. Juara Harapan II Futsal Tingkat Nasional (Tahun 2006)
- f. Juara I Nasional Cabang Basket Putri Tingkat SMK (Tahun 2007)
- g. Juara II Nasional Cabang Bola Voli Putri Tingkat SMK (Tahun 2007)
- h. Juara I Bola Voli Putra Tingkat Nasional (Tahun 2008)
- i. Juara II Sepak Bola Tingkat Nasional (Tahun 2008)
- j. Juara III Bulutangkis Putri Tingkat Nasional (Tahun 2008)
- k. Juara III Nasional Lari 100 M Putra Tingkat Nasional (Tahun 2008)
- l. Juara I Olimpiade Olahraga Nasional Cabang Renang Putra Tingkat SD.
- m. Juara II Olimpiade Olahraga Nasional Cabang Karate Kumite Putri (Tahun 2008)
- n. Juara I Tingkat Nasional Peserta Kepemimpinan dan Bela Negara (Tahun 2008)
- o. Juara III Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SD cabang Renang Putri (Tahun 2009)
- p. Juara III Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SD cabang Karate Putra (Tahun 2009)
- q. Juara III Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SD cabang Karate Putri (Tahun 2009)
- r. Juara III Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SD cabang Tenis Putri (Tahun 2009)
- s. Juara III Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SD cabang Catur Perorangan Putra (Tahun 2009)

Dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga dari tahun 2005-2010 didukung alokasi anggaran sebagai berikut :



**Tabel 3.18. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1.	2005	428.060.000,00	479.553.288,00	99,48
2.	2006	27.303.819.600,00	21.235.424.425,00	77,77
3.	2007	43.059.166,850,00	34.612.491,325,00	80,38
4.	2008	855.857.500,00	719.857.500,00	84,07
5.	2009	1.139.172.000,00	898.167.500,00	78,84

Sumber : Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Data terkait dengan kegiatan kepemudaan dan olahraga tahun 2005 – 2009, sebagai berikut:

**Tabel 3.19. Data Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009**

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah organisasi kepemudaan (buah)	4	10	15	17	20
2.	Jumlah cabang olahraga (buah)	30	32	32	34	34
3.	Jumlah prestasi generasi muda (buah)	6	11	15	16	23
4.	Jumlah prestasi olahraga	6	7	11	27	73
5.	Peran (variabel kegiatan)	1	3	5	7	12

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp1.858.101.000,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda melalui kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
- b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
  - 1) Pembinaan organisasi kepemudaan
  - 2) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
  - 3) Pemilihan dan pengiriman peserta Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP)
  - 4) Pembinaan budi pekerti pemuda
- c. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
  - 1) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
  - 2) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi siswa
  - 3) Rintisan desa pelopor bebas NAPZA



- d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
  - 1) Penyelenggaraan kompetisi olah raga
  - 2) Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
  - 3) Pembinaan olah raga bagi masyarakat
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga melalui kegiatan peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana olah raga
- f. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda melalui kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan kepemudaan

Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- a. Maraknya jejaring sosial virtual pada tahun 2006-2009 ini seperti *Friendster*, *Facebook*, *Twitter* dan komunitas *blogger* lainnya, menyebabkan kepopuleran organisasi masyarakat kepemudaan menurun.
- b. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penilaian anak secara akademis menyebabkan prestasi di bidang olahraga banyak ditinggalkan.
- c. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan olahraga yang belum terpadu antar lembaga/institusi (KONI, Depdiknas, Kemenegpora, swasta)

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diatas, dapat ditempuh kebijakan bagi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan urusan pendidikan di masa mendatang, yaitu:

- a. Mempopulerkan kembali organisasi masyarakat kepemudaan seperti Karang Taruna dengan program-program inovatif seperti membuat jejaring komunitas Karang Taruna *online* seluruh Kabupaten Sleman.
- b. Sosialisasi manfaat prestasi olahraga bagi pelajar dan mahasiswa.
- c. Perlu adanya kerjasama dengan lembaga swasta/dunia usaha sehingga kebutuhan dan fasilitasi untuk kepemudaan dan Olah Raga tercukupi.
- d. Pemberian bantuan dan bimbingan kepada pemuda dan masyarakat dalam meraih prestasi baik disekolah maupun di masyarakat.



- e. Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan untuk menciptakan iklim yang kondusif.

## 9. Urusan Penanaman Modal

Kondisi pelayanan penanaman modal pada tahun 2005 relatif baik dan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mengembangkan penanaman modal. Untuk itu dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan investasi khususnya dalam pelayanan perijinan.

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Program penciptaan iklim dan peluang investasi yang kondusif.
- b. Program peningkatan promosi investasi.
- c. Program pengendalian penanaman modal.
- d. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan tersebut mampu mendukung keberhasilan pembangunan penanaman modal selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) mencapai hasil yang cukup menggembirakan dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.20. Data Penanaman Modal Kabupaten Sleman

No	Uraian	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Unit Usaha					
	a. PMA	35	38	36	35	33
	b. PMDN	39	38	36	32	31
	c. Non PMA dan Non PMDN	24.408	25.653	26.222	27.783	28.320
2.	Nilai Investasi					
	a. PMA (Juta US\$)	149,58	149,43	148,82	148,67	148,23
	b. PMDN (Milyar Rp)	507,71	355,15	344,99	323,07	321,55
	c. Non PMA dan Non PMDN (Milyar Rp)	1.265,76	1.459,83	1.712,88	1.864,63	1.983,93



1	2	3	4	5	6	7
3.	Penyerapan Tenaga Kerja (org)					
	a. PMA	5.836	6.243	6.163	6.113	6.107
	b. PMDN	9.701	9.438	9.387	9.131	9.065
	c. Non PMA dan Non PMDN	182.833	192.554	201.832	209.581	215.237

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman selama 5 tahun, baik investasi PMA maupun PMDN mengalami penurunan dalam hal capaian jumlah unit usaha maupun nilai investasi dari PMA dan PMDN. Sedangkan untuk penanaman modal non PMA dan non PMDN dari 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan naik, baik dari jumlah unit usaha maupun nilai investasinya. Hal tersebut dikarenakan perubahan jumlah unit usaha PMA dan PMDN bukan semata-mata adanya penutupan usaha, tetapi juga dikarenakan adanya pengalihan status dari PMA ke non PMA, dan dari PMDN ke non PMDN.

Penambahan unit usaha non PMA dan non PMDN dari tahun 2005-2009 berdasarkan data yang ada pada tahun 2005 berjumlah 24.408 unit dengan nilai investasi 1.265.760.000,00 kemudian naik menjadi 28.320 unit dengan nilai investasi 1.983.930.000,00 pada tahun 2009. Kenaikan unit usaha dan nilai investasi non PMA dan non PMDN dibarengi dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja non PMA dan non PMDN, pada tahun 2005 dapat menyerap tenaga kerja 182.833 orang menjadi 215.237 orang pada tahun 2009.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal dari tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.21. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal**

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
1.	2005	225.000.000,00	215.696.800,00	95,87
2.	2006	208.250.000,00	196.330.000,00	94,28
3.	2007	309.940.000,00	296.255.090,00	95,58
4.	2008	381.409.000,00	361.994.700,00	94,91
5.	2009	671.302.000,00	615.179.400,00	91,64



Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal sebesar Rp930.826.000,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi penanaman modal tingkat kabupaten, provinsi dan pusat
- b. Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- c. Pengelolaan dokumen penanaman modal perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA ) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- d. Identifikasi/penyusunan profil potensi investasi
- e. Pembuatan materi promosi investasi
- f. Indovert 2009 di Jakarta
- g. Indonesia Today 2009 di Singapura
- h. Invesda Expo 2009 di Yogyakarta
- i. Investor Gathering di Jakarta
- j. Pengiriman misi investasi
- k. Forum komunikasi investasi
- l. Promosi investasi tingkat internasional 2009

Dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan penanaman modal antara lain:

- a. Pengelolaan promosi investasi belum optimal;
- b. Iklim investasi belum kondusif khususnya dalam hal pelayanan perizinan;
- c. Lahan bagi usaha industri berskala menengah/besar terbatas.

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan penanaman modal pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan investasi melalui promosi.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi.





## 10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu :

- a. Mengembangkan industri ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya yang berorientasi ekspor.
- b. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan lptek dalam usaha perekonomian terutama UMKM.
- c. Meningkatkan peran sektor perdagangan, pariwisata, dan koperasi dengan mengembangkan potensi dan peran serta masyarakat.

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Program penanggulangan kemiskinan.
- b. Program pengembangan kewirausahaan UKM.
- c. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
- d. Program pembentukan produk hukum, penegakan hukum dan HAM.
- e. Program penyiapan sumberdaya sarana dan prasarana usaha ekonomi.
- f. Program pengembangan data, informasi dan statistik daerah.
- g. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

Pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan tersebut mampu mendukung keberhasilan pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil menengah selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) mencapai hasil yang cukup menggembirakan dengan indikator sebagai berikut :



Tabel 3.22. Data Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Uraian Data	Tahun Anggaran				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah koperasi	530	546	561	587	601
2.	Jumlah anggota koperasi	199.095	199.415	201.551	208.159	218.835
a.	Koperasi Simpan Pinjam	17.413	17.531	31.361	34.733	36.872
b.	Koperasi Serba Usaha	87.239	87.441	84.362	90.616	90.616
c.	KUD	94.443	94.443	85.828	82.810	91.069
3.	Penerbitan badan hukum koperasi	11	16	19	16	14
4.	Stimulan modal					
a.	Jumlah kelompok	31	55	48	48	33
b.	Jumlah dana (Rp000)	500.000	822.500	1.500.000	3.000.000	3.150.000
5.	Nilai Kesehatan USP/KSP:					
a.	Sehat	57	47	75	48	49
b.	Cukup Sehat	50	76	54	32	26
c.	Kurang Sehat	3	7	1	1	0
d.	Tidak Sehat	0	0	0	0	0
6.	Kondisi Koperasi:					
a.	Koperasi Aktif	247	265	245	290	481
b.	Koperasi Tidak Aktif	187	187	223	206	29
c.	Koperasi Beku/Mati	96	94	93	91	91
7.	Hasil Usaha Koperasi (000)					
a.	Jumlah modal sendiri	56.784.901	60.835.247	85.802.971	96.995.470	118.189.567
b.	Volume usaha	372.601.397	449.393.364	514.010.938	656.431.240	671.888.372
c.	Sisa Hasil Usaha	9.815.822	10.014.413	10.519.805	12.290.390	16.064.961

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sebagai penjabaran kebijakan dan program dalam urusan urusan koperasi dan usaha kecil telah dapat memacu pertumbuhan koperasi yang cukup menjanjikan sebagai salah satu sokoguru perekonomian daerah, baik dilihat dari kuantitas (lembaga dan anggota) maupun secara kualitas (usaha). Dilihat dari lembaga dan anggotanya, jumlah koperasi berdasarkan data yang ada pada tahun 2005 berjumlah 530 unit dengan anggota 199.095 orang dan bertambah menjadi 601 unit dengan anggota 218.835 orang di tahun 2009. Sedangkan dilihat dari usaha koperasi, pada tahun 2005 jumlah volume usaha Rp372.601.397.000,00 dengan SHU sebesar Rp9.815.822.000,00 . Pada



tahun 2009 angka tersebut telah berkembang mencapai Rp 671.888.372.000,00 dengan SHU Rp 16.064.961.000,00.

Pada tahun 2005 dari 530 koperasi terdapat 247 koperasi aktif (46,60%), 187 koperasi tidak aktif (35,28%), dan koperasi beku 96 (18,11%). Data tersebut pada tahun 2009 mengalami perubahan yaitu dari 601 koperasi terdapat 481 koperasi aktif (80,03%), 29 koperasi tidak aktif (4,86%), dan 91 koperasi beku (15,14%). Bertambahnya jumlah koperasi aktif sebesar 94,74% dari tahun 2005 ke tahun 2009 disebabkan adanya perubahan kriteria koperasi aktif di tahun 2009 yaitu dari koperasi yang melaksanakan RAT menjadi koperasi yang secara riil melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang usahanya.

Prestasi dan penghargaan di tingkat nasional yang diraih Kabupaten Sleman dalam koperasi dan usaha kecil menengah antara lain meliputi :

- a. Koperasi berprestasi tingkat nasional diraih oleh Koperasi Pegawai UPN "Veteran" (tahun 2008)
- b. Keteladanan koperasi tingkat nasional diraih oleh Koperasi Wanita Anggrek Mekar (Tahun 2008)

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah dari tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.23. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
1.	2005	217.000.000,00	214.244.400,00	98,73
2.	2006	266.030.500,00	259.261.675,00	94,45
3.	2007	426.100.000,00	411.490.580,00	96,57
4.	2008	477.900.000,00	469.950.000,00	98,34
5.	2009	542.000.000,00	530.078.250,00	97,80



Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah sebesar Rp1.362.942.000,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif melalui fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil dan menengah
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
  - 1) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
  - 2) Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
  - 3) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
  - 4) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
  - 5) Fasilitasi pengembangan sarana promosi dan hasil produksi (SETDA)
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  - 1) Sosialisasi prinsip pemahaman perkoperasian
  - 2) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil antara lain:

- a. Kualitas SDM pengelola koperasi/UMKM masih rendah.
- b. Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan disain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah.
- c. Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas.
- d. Akses modal bagi UMKM masih terbatas.



Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota.
- b. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, kemampuan akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.

#### **11. Urusan Kependudukan dan Capil**

Dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis yaitu mengupayakan rumusan kebijakan yang disesuaikan dengan permasalahan daerah untuk lebih meningkatkan pengelolaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan terjangkau yang didukung adanya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang memadai

Berbagai kebijakan tersebut dituangkan dalam program-program sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik.
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- c. Peningkatan Administrasi Pemerintahan.
- d. Peningkatan Manajemen Data.
- e. Peningkatan Manajemen Kependudukan.

Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program tersebut mampu mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) mencapai hasil yang cukup baik dengan indikator sebagai berikut :



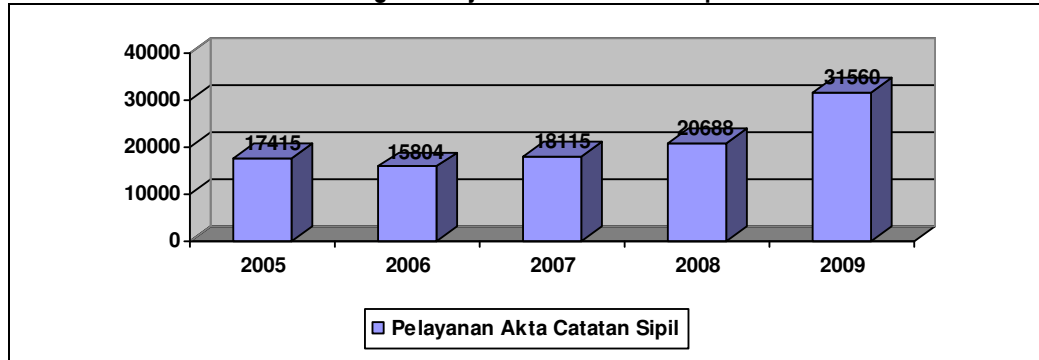
**Tabel 3.24. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman  
Tahun 2005-2009**

No	Uraian Data	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pelayanan Kartu Keluarga (KK)	61.541	77.551	119.606	137.896	101.931
2.	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	198.859	194.636	216.320	243.766	210.728
3.	Pelayanan Kartu Identitas Penduduk Musiman	4.172	6.152	6.368	7.820	4.200
4.	Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara	171	192	201	168	125
5.	Pelayanan Izin Penduduk Dalam Provinsi	1.327	1.621	2.110	2.870	2.590
6.	Pelayanan Izin Penduduk Luar Provinsi	3.526	4.596	4.820	7.702	6.793
7.	Pelayanan Akta Catatan Sipil	17.415	15.804	18.115	20.688	31.560
a.	Akta Kelahiran	15.877	14.271	16.522	18.623	26.862
b.	Akta Perkawinan	444	948	588	597	1.023
c.	Akta Perceraian	54	56	55	65	64
d.	Akta kematian	1.015	498	915	1.374	3.581
e.	Pengakuan dan Pengesahan Anak	2	9	4	1	7
f.	Pengangkatan anak	23	22	31	28	23

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dari tabel data perkembangan urusan kependudukan dan catatan sipil dari tahun 2005-2009 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa secara umum pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di kabupaten sleman meningkat, terutama dalam Pelayanan Akta Catatan Sipil, yang meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, serta Pengangkatan Anak. Pelayanan Akta Catatan Sipil tersebut meningkat tajam sebesar 181% dari tahun 2005 sebanyak 17.415 akta menjadi 31.560 akta di tahun 2009.

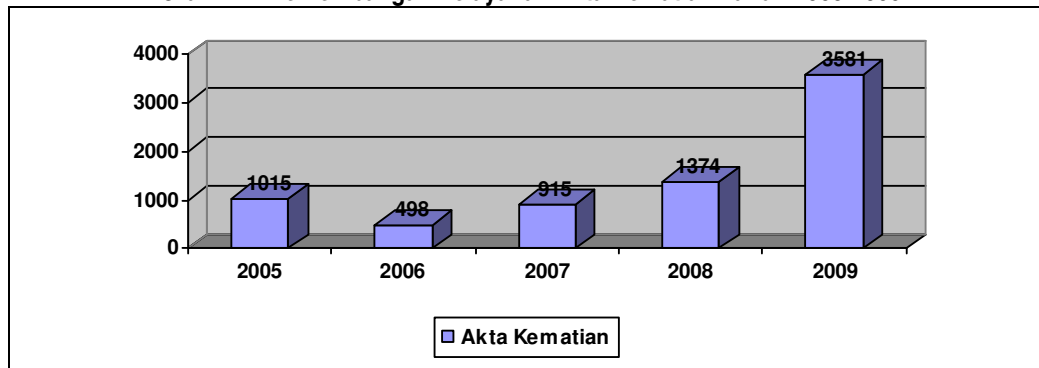
**Grafik 13. Perkembangan Pelayanan Akta Catatan Sipil Tahun 2005-2009**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan pelayanan penerbitan akta catatan sipil tersebut terjadi khususnya pada pelayanan Akta Kematian, yang meningkat sebesar 352% dari 1.015 akta di tahun 2005 menjadi 3.581 akta di tahun 2009. Peningkatan Akta Kematian tersebut khususnya terjadi di tahun 2009 karena pada tahun 2009 tersebut dilakukan kegiatan Jemput Bola Akta Kematian, yang dilaksanakan di 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gamping, Godean, Tempel, Berbah, Turi, Moyudan, Pakem.

**Grafik 14. Perkembangan Pelayanan Akta Kematian Tahun 2005-2009**

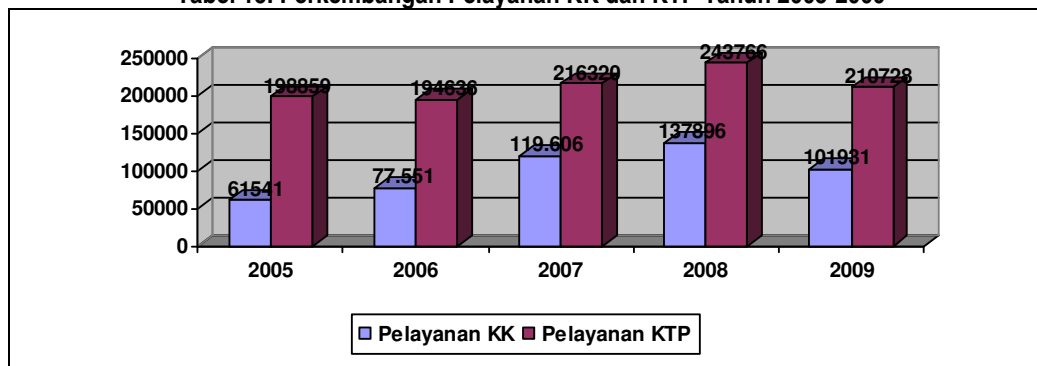


Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sedangkan untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK) secara umum menunjukkan peningkatan sebesar 165% atau sebanyak 101.931 di tahun 2009 dibandingkan dengan kondisi tahun 2005 sebanyak 61.541 KK. Peningkatan juga terjadi pada pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 198.859 KTP di tahun 2005 menjadi 210.728 KTP pada tahun 2009, atau sebesar

105%. Walaupun secara umum dalam dua pelayanan kependudukan tersebut diatas meningkat, namun terjadi sedikit penurunan di tahun 2009 jika dibandingkan dengan pelayanan kependudukan di tahun 2008, hal ini disebabkan oleh sebagian penduduk yang migrasi keluar daerah tetapi tidak melapor, yang berdampak pada dokumen kependudukan penduduk yang bersangkutan tidak diperpanjang sehingga target kinerja kegiatan pelayanan KK dan KTP tahun 2009 belum optimal.

**Tabel 15. Perkembangan Pelayanan KK dan KTP Tahun 2005-2009**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Berbagai upaya telah dilakukan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil selama kurun waktu 2005-2009 baik untuk meningkatkan manajemen kependudukan, manajemen data, dan kualitas pelayanan publik, antara lain: pada tahun 2006 telah dilakukan pemutakhiran data untuk bank data daerah yang kemudian untuk dikonversi ke bank data nasional dalam rangka penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Kemudian pada tahun 2007 telah tersedia bank data kependudukan Kabupaten Sleman yang siap di konversi ke bank data nasional dalam rangka penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pelaporan data base kependudukan telah dilakukan dengan sistem online di 10 kecamatan (Kecamatan Gamping, Godean, Moyudan, Seyegan, Mlati, Depok, Ngaglik, Sleman, Tempel dan Pakem) dari 17 kecamatan yang ada. Selain itu telah dilakukan pemutakhiran data penduduk untuk kepentingan pemilu 2009, sehingga terbentuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Untuk





tahun 2009, pelaporan data base kependudukan Kabupaten Sleman telah berhasil dilakukan dengan sistem online di semua kecamatan (17 kecamatan).

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.25. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1.	2005	554.006.200,00	538.566.500,00	97,21
2.	2006	703.286.240,00	636.756.965,00	90,54
3.	2007	3.193.410.560,00	2.886.466.653,00	90,42
4.	2008	2.158.676.000,00	2.084.094.163,00	96,55
5.	2009	1.661.403.250,00	1.584.045.505,00	95,34

Sumber: Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil.

Untuk tahun 2010, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp2.841.043.000,00 melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan:

- a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 5 tahun terakhir
- b. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pembangunan
- c. Sosialisasi kebijakan kependudukan
- d. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil
- e. Pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil
- f. Fasilitasi pembantu pegawai pencatat perkawinan
- g. Peningkatan sarana dan prasarana SIAK
- h. Pelayanan umum dan administrasi kependudukan di 17 kecamatan
- i. Pemutakhiran data kependudukan melalui SIAK di 17 kecamatan

Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- a. Belum terintegrasinya data base kependudukan dengan sektor-sektor yang lain seperti layanan pajak, kepolisian, perbankan dan lain-lain.



- b. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih rendah dan banyaknya pendatang terutama pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Sleman yang tidak melaporkan dan tidak melakukan registrasi kependudukan.

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan sistem manajemen kependudukan
- b. Peningkatan tertib administrasi kependudukan

## **12. Urusan Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Urusan ketenagakerjaan berkaitan dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja. Terkait hal tersebut maka dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja.
- b. Meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja serta mekanisme ketenagakerjaan yang mengarah kepada kesejahteraan peserta
- c. Meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pendidikan ketrampilan dan pelatihan tenaga kerja.

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program antara lain sebagai berikut :

- a. Program peningkatan informasi kerja dan kualitas penempatan tenaga kerja.
- b. Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.



- c. Program peningkatan kualitas calon tenaga kerja dan lembaga pelatihan kerja.

Pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan tersebut mampu mendukung keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) mencapai hasil yang cukup menggembirakan dengan indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.26. Capaian Keberhasilan Pembangunan Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009**

No	Uraian Data	Tahun Anggaran				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Angkatan Kerja	387.641	409.298	421.690	425.338	468.024
	a. Angkatan kerja yang bekerja	346.198	358.908	375.242	380.780	422.490
	b. Angkatan Kerja yang tidak bekerja	41.443	50.390	46.448	44.558	45.534
2.	Jumlah Lowongan/Kesempatan Kerja	5.040	4.651	4.389	4.194	4.194
3.	Jumlah Perusahaan	760	835	790	849	896
4.	Jumlah tenaga kerja di perusahaan	46.513	54.961	43.663	46.879	46.986
	a. Peserta Jamsostek	26.246	29.417	29.567	29.567	29.603
	b. Non Peserta Jamsostek	20.267	25.544	14.095	17.312	17.383
5.	Penempatan Tenaga Kerja					
	a. AKL	3.350	3.796	3.568	3.344	4.799
	b. AKAD	1.094	579	355	602	398
	c. AKAN	704	186	344	128	138
6.	Pemberian bantuan modal kepada TKI (orang)	71	45	50	50	50
7.	Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1)- orang	25.055	9.367	9.085	11.859	12.326
8.	Penyelesaian perselisihan perburuhan (kasus)	57	20	30	43	45



1	2	3	4	5	6	7
9.	Jumlah kecelakaan kerja (kasus)	96	101	93	78	99
	a. Jatuh	10	3	2	-	6
	b. Terpukul	3	5	2	4	3
	c. Terjepit	12	5	17	4	4
	d. Listrik	-	1	-	-	-
	e. Penyakit akibat kerja	-	-	-	-	-
	f. Terbakar	-	-	-	-	-
	g. Lain-lain	68	87	72	70	85
10.	Jumlah UMR/UMP (Rp)	400.000	460.000	500.000	586.000	700.000
11.	Jumlah PHK/PHI (kasus)	30	42	38	31	38
12.	Pelatihan tenaga kerja					
	a. Latihan Institusional	62	192	172	96	286
	b. Latihan non institusional (MTU)	170	528	390	324	570
	c. Latihan Swadana	93	230	190	173	118
13.	Jumlah alumni BLK	797	950	804	1167	666
14.	Jumlah alumni BLK yang bekerja	478	532	261	-	414
15.	Jumlah Peserta lulus BLK	474	794	907	1089	974
16.	Jumlah Peserta tidak lulus BLK	22	43	43	69	91

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Aktivitas perekonomian di Sleman telah menyerap tenaga kerja sebanyak 89,30% tenaga kerja pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 90,27% pada tahun 2009. Kondisi tersebut menurunkan tingkat pengangguran dari 10,69% dari total angkatan kerja pada tahun 2005, menjadi 9,69 % dari total angkatan kerja pada tahun 2009.

Untuk menambah jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan, Balai Latihan Kerja telah melaksanakan pelatihan kerja baik institusional, non institusional kejuruan maupun swadana. Jumlah peserta pelatihan dari tahun 2005 ke tahun 2009 meningkat sebesar 202,76% atau dari 325 orang menjadi 984 orang. Komposisi jumlah peserta pelatihan institusional, non institusional dan swadana pada tahun 2005 adalah 62 orang, 170 orang, dan 93 orang. Jumlah peserta pelatihan institusional, non-institusional dan swadana meningkat pada tahun 2009 menjadi 286 orang, 570 orang, dan 118 orang.



Perluasan kesempatan kerja juga dilaksanakan melalui pelayanan penempatan tenaga kerja program Antar Kerja Lokal (AKL) kepada 3.350 pada tahun 2005 meningkat menjadi 4.799 orang di tahun 2009. Melalui program dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) telah menempatkan 1.094 orang tenaga kerja di tahun 2005 namun cenderung menurun hingga sebanyak 398 orang di tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan tenaga kerja cenderung bekerja di wilayah lokal saja. Sementara itu, untuk membantu tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri, pada tahun 2009 telah dilakukan pemberian pinjaman dana kepada 50 Tenaga Kerja Indonesia luar negeri. Pengiriman tenaga kerja ke luar daerah dan luar negeri hanya dilakukan untuk tenaga kerja terampil yang memiliki keahlian bukan pembantu rumah tangga.

Dalam upaya mengatasi dampak krisis keuangan global pada tahun 2008 telah dikembangkan kegiatan padat karya di 86 desa yang masing-masing desa memperoleh Rp 17 juta. Dana padat karya tersebut diperuntukan membangun sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan desa. Kegiatan ini dilaksanakan sekaligus untuk mendidik masyarakat untuk selalu bekerja dan menumbuhkan rasa "*handarbeni*" terhadap sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungannya.

Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja telah diselenggarakan pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja, dengan melakukan pengawasan perusahaan dalam melaksanakan norma kerja dan K3, pembayaran premi Jamsostek bagi tenaga kerja kontrak dan honorer 606 orang, mediasi penyelesaian kasus PHI/PHK sebanyak 30 kasus, sosialisasi perlindungan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) ke luar negeri dan pembinaan perlindungan CTKI ke luar negeri 100 orang serta sosialisasi pelaksanaan UMP dan THR pada 25 perusahaan dan 50 wakil pekerja.



Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.27. Alokasi Anggaran untuk Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1.	2005	631.845.000,00	617.690.600,00	97,76
2.	2006	1.342.220.000,00	1.324.094.000,00	98,64
3.	2007	2.051.089.250,00	1.835.996.563,00	89,51
4.	2008	4.062.644.170,00	3.571.115.207,00	87,90
5.	2009	2.377.023.400,00	2.189.889.755,00	92,13

Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sebesar Rp3.208.303.100,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - 1) Kajian perencanaan ketenagakerjaan daerah
  - 2) Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja
  - 3) Peningkatan profesionalisme tenaga pelatihan dan instruktur BLK
  - 4) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
  - 5) Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana BLK
  - 6) Monitoring lulusan dan informasi latihan
  - 7) Pemagangan lulusan pelatihan ke perusahaan selama 3 bulan kerja
  - 8) Fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi
  - 9) Penyusunan modul CBT
  - 10) Penyusunan proses mekanisme perijinan tempat uji kompetensi
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  - 1) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
  - 2) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
  - 3) Pengembangan kelembagaan produktifitas dan kewirausahaan
  - 4) Penempatan tenaga kerja terdaftar
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  - 1) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial



- 2) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
- 3) Peningkatan pengawasan, perlindungan penegak hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
- 4) Pengawasan norma ketenagakerjaan di perusahaan
- 5) Pengelolaan bantuan pinjaman TKI
- 6) Pendampingan dan bimbingan penyusunan PKWT, PP, PKB dan pembentukan lembaga Bipartit
- 7) Peningkatan peran LKS Tripartit
- 8) Fasilitasi pemberian Jamsostek bagi tenaga kerja kontrak/honorer Pemkab Sleman

Dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan antara lain:

- a. perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- b. kualitas dan daya saing calon tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan pasar;
- c. sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai;

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja.
- b. Meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja.
- c. Meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja dan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja.
- d. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keserasian hubungan industrial.



### 13. Urusan Ketahanan Pangan

Kebijakan pelaksanaan urusan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman pada tahun 2005-2010 adalah membangun sektor pertanian ke arah agribisnis dengan memperkuat sistem pertanian dalam arti luas.

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam berbagai program kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
- b. Kajian arah pengembangan pangan lokal
- c. Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP)
- d. Pengawasan Mutu, Konsumsi dan Keamanan Pangan
- e. Revitalisasi Lumbung Pangan
- f. Pendampingan Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- g. Penanganan Daerah Rawan Pangan
- h. Pendampingan Peningkatan Ketahanan Pangan Peternakan
- i. Gerakan Kampanye Makan Ikan dan Minum Susu

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut mampu mendukung keberhasilan peningkatan ketahanan pangan selama kurun waktu 5 tahun (2005 - 2010). Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman secara umum terlaksana dengan baik sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini: .

Tabel 3.28. Capaian Indikator Pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan

Indikator	Capaian Kabupaten Sleman				
	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
Aspek Ketersediaan Pangan					
1. Surplus beras ( ton )	83.349	90.063	82.440	96.571	95.925
2. Produktifitas					
a. Padi sawah	57,15	57,48	57,17	62,14	60,87
b. Padi ladang	30,04	29,21	22,84	30,17	30,42
Aspek Distribusi Pangan					
1. Harga Beras di Kab. Sleman					
a. Harga tertinggi	3.671	4.754	5.342	5.133	5.383
b. Harga terendah	2.640	3.546	4.288	4.400	4.875
c. Rerata harga beras	3.028	3.672	4.748	4.748	5.097





1	2	3	4	5	6
2. Jumlah 3 bulan berturut-turut dengan harga lebih dari 25% dari rerata harga pasar	0 (Stabil)	0 (Stabil)	0 (Stabil)	0 (Stabil)	0 (Stabil)
Aspek Konsumsi Pangan					
1. Konsumsi beras ( kg/kapita/tahun )					
a. Nasional	118,00	118,00	118,00	120,00	120,00
b. Kabupaten Sleman	63,70	63,70	63,70	63,70	63,70
2. Konsumsi protein hewani (kg/kapita/tahun)	12,47	13,41	13,97	14,56	14,45
3. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	17,50	20,30	23,14	24,80	25,95
4. Kekurangan Energi Protein (KEP) % KEP < 15% = Resiko rawan pangan gizi ringan	11,82	11,36	10,96	11,66	10,85
5. Angka Kecukupan Gizi					
a. Energi (K. Kalori/kapita/hari)					
- Nasional	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Kab. Sleman	1.932,3	1.936,2	2.001,4	2.018,8	2.029,9
b. Protein (Gram/kapita/hari)					
- Nasional	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Kab. Sleman	60,6	63,1	52,0	63,6	61,1
Jumlah Desa Potensi Rawan Pangan dan Gizi Pendekatan indikator jumlah KK Miskin > 30 %	23	18	13	8	7

Sumber: Sekretariat Daerah

Salah satu indikator pencapaian program peningkatan ketahanan pangan pada aspek ketersediaan pangan adalah surplus beras sebagai bahan pangan utama di Kabupaten Sleman. Walaupun dihadapkan pada tantangan peningkatan kebutuhan beras yang tidak diikuti penurunan laju alih fungsi lahan, selama tahun 2005 – 2009 Kabupaten Sleman masih mampu mempertahankan predikat sebagai lumbung beras di Propinsi DIY. Peningkatan surplus beras didukung Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) melalui berbagai kegiatan :

- Bantuan benih padi dan subsidi pupuk
- Kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)
- Pemanfaatan teknologi budidaya dan pengolahan pasca panen
- Optimalisasi pemanfaatan air irigasi
- Penerapan teknologi SRI (System of Rice Intensification)

Peningkatan produksi padi sawah pada tahun 2008 disebabkan antara lain Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) yang dilaksanakan tahun 2007 dan dipanen tahun 2008, bantuan pupuk organik dari dana APBD Provinsi



dan bantuan benih dan kegiatan SLPTT padi seluas 11.000 Ha, bantuan benih Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dari Departemen Pertanian 1.500 Ha untuk Padi Non Hibrida dan 500 Ha untuk Padi Hibrida.

Untuk aspek distribusi pangan, khususnya stabilisasi harga pangan pokok (beras), selama lima tahun terakhir belum pernah terjadi lonjakan kenaikan harga melebihi dari 25% dari rerata harga pasar selama tiga bulan berturut-turut. Melalui Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM LUEP), Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat Sistem Tunda Jual (BPLM STJ) dan kegiatan Operasi Pasar Khusus oleh Bulog, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mampu melaksanakan stabilisasi harga pada posisi harga wajar dan terjangkau.

Untuk konsumsi beras per kapita per tahun tidak mengalami perubahan dari tahun 2005 hingga 2009 sebanyak 63,7 kg/kapita/tahun jauh lebih rendah dari konsumsi beras nasional 118 kg/kapita/tahun. Sebagian warga Sleman mulai mengurangi konsumsi nasi beras (kelompok pangan padi-padian) dan sedikit demi sedikit mulai mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras.

Konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Sleman juga mengalami peningkatan, pada tahun 2005 konsumsi ikan perkapita sebesar 19,60 kg dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 25,95 kg. Tingkat konsumsi ikan di Sleman secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi ikan di propinsi DIY yaitu sebesar 19,23 untuk tahun 2009. Peningkatan konsumsi ikan di Sleman ini dipicu oleh meningkatnya jumlah rumah makan/restoran ikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan yang mulai bergeser pada konsumsi makanan non kolesterol.

Dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) menunjukkan adanya peningkatan konsumsi energi dari tahun 2005 senilai 1.932,3 K menjadi 2.029,9 K. Kal/kapita/hari pada tahun 2009 yang mana mendekati angka ideal Nasional 2.200 K.kal/kapita/hari. Sedangkan untuk konsumsi protein selama lima tahun terakhir selalu mencapai diatas angka ideal Nasional 50 gram/kapita/tahun.



Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang Aman Berragam, Bergizi dan Beragam, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Berbagai prestasi penghargaan ketahanan pangan Tingkat Nasional yang diraih Kabupaten Sleman dalam urusan peningkatan ketahanan pangan antara lain meliputi :

- a. Juara Lomba Kelompok Binaan PKK Bidang Ketahanan Pangan Tingkat Nasional atas nama kelompok PKK Desa Donokerto, Turi (2005).
- b. Juara III Lomba Kebun Buah Prima Tingkat Nasional atas nama H. Musrin Kelompok "Duri Kencana", Merdikorejo Tempel (2005).
- c. Juara Lomba Kelompok Binaan PKK Bidang Ketahanan Pangan Tingkat Nasional atas nama PKK Desa Sendangadi, Mlati (2006).
- d. Juara Lomba Kelompok Ternak Unggas Tingkat Nasional atas nama kelompok ternak itik "Iwen Dadi", Japanan, Margodadi, Seyegan (2006).
- e. Juara Lomba Penyuluh Teladan Nasional Bidang Perkebunan atas nama Drs. Prayoga, AMD (2006).
- f. Juara Lomba Petugas Poskeswan Berprestasi Tingkat Nasional atas nama Drh. I. Nyoman (2006).
- g. Juara Lomba Kelompok Binaan PKK Bidang Ketahanan Pangan Tingkat Nasional atas nama Kelompok Wanita "Kopwan Anggrek Mekar", Minomartani, Ngaglik (2007).
- h. Juara Lomba Kelompok Agribisnis Hortikultura – Tanaman Buah Tingkat Nasional atas nama kelompok tani "Si Cantik", Ledoknongko, Bangunkerto, Turi (2007).
- i. Juara Lomba Petugas Pengumpul Data TPH Tingkat Nasional atas nama Sudarsini, SP., PPD Kecamatan Depok (2007).
- j. Juara Lomba Petani Teladan Tingkat Nasional atas nama Drs. Bambang Setyadi, Hargobinangun, Pakem (2007).
- k. Juara Lomba Dokter Hewan Berprestasi Tingkat Nasional atas nama Drh. Sigit Aryanto (2007).



- l. Juara Lomba Kelompok Tani Pengembang Perkebunan Tingkat Nasional atas nama H. Hadi Sutrisno, Nglaren Condongcatur, Depok (2007).
- m. Juara Lomba Kelompok Binaan PKK Tingkat Nasional atas nama Kelompok Perempuan Kreatif “Cempaka”, Margorejo, Tempel (2008).
- n. Juara Lomba Kelompok Agribisnis Hortikultura – Tanaman Buah Tingkat Nasional atas nama kelompok tani “Kembang Mulyo”, Wonokerto, Turi (2008).
- o. Juara Lomba Kelompok Agribisnis Hortikultura – Tanaman Sayuran dan Biofarma Tingkat Nasional atas nama CV. Merapi Farma, Hargobinangun, Pakem (2008).
- p. Juara Lomba Petani Pengembang Perkebunan Tingkat Nasional atas nama Paidi, Kujon Purwomartani, Kalasan (2008).
- q. Juara Lomba Penerap Mutu Hasil Hortikultura Tingkat Nasional atas nama Kelompok Tani “Duri Kencana”, Trumpon, Merdikorejo, Tempel (2008).
- r. Juara Lomba Penerap Mutu Hasil Perkebunan Tingkat Nasional atas nama KUB Kebun Makmur, Glagaharjo, Gangkringan (2008).
- s. Juara Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Tingkat Nasional atas nama PKK Padukuhan Kedung Banteng, Sumberagung, Moyudan (2008).
- t. Juara Lomba Kelompok Binaan PKK Bidang Ketahanan Pangan Tingkat Nasional atas nama Kelompok Wanita “KSP Kartini”, Hargobinangun, Pakem (2009).
- u. Juara Lomba Lumbung Pangan Tingkat Nasional atas nama Lumbung Pangan “Sekeng Rukun”, Trihanggo, Gamping (2009).
- v. Juara Lomba Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Tingkat Nasional atas nama Budi Santosa, SP (2009)
- w. Juara Lomba Kelompok Agribisnis Hortikultura – Tanaman Buah Tingkat Nasional atas nama H. Musrin, B.Sc (2009).
- x. Juara Lomba Agribisnis Hortikultura – Tanaman Hias Tingkat nasional atas nama Asosiasi Petani Krisan (APRISTA), Hargobinangun, Pakem (2009).
- y. Juara Lomba Kelompok Pengembang Perkebunan Tingkat Nasional atas nama H. Madyo Wardoyo, KPTR Sidomakmur, Sariharjo, Ngaglik (2009).



- z. Juara Lomba Perkumpulan Petani Pemakai Air Tingkat Nasional atas nama Tarminanto, P3A Sidomulyo, Bangunkerto, Turi (2009).
- aa. Juara Lomba Penerapan Mutu Hasil Perkebunan Tingkat Nasional atas nama KUB Kebun Makmur, Glagaharjo, Cangkringan (2009).

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan peningkatan ketahanan pangan tahun 2005 - 2010 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.29. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan**

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1.	2005	158.082.150	154.112.170	97,49
2.	2006	3.811.453.300	2.834.805.982	93,53
3.	2007	1.022.726.399	903.394.700	88,33
4.	2008	4.062.639.170	3.571.115.207	87,90
5.	2009	511.110.000	456.892.650	89,39

Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan ketahanan pangan sebesar Rp2.834.622.600,00, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penanganan daerah rawan pangan
- b. Analisa dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
- c. Pemantauan dan analisis eksese harga pangan pokok
- d. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
- e. Pengembangan cadangan pangan daerah
- f. Pengembangan desa mandiri pangan
- g. Pengembangan lumbung pangan desa
- h. Pengembangan perbenihan/pembibitan
- i. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- j. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
- k. Penyuluhan sumber pangan alternatif
- l. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk peternakan



- m. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian tanaman hortikultura
- n. Pemantauan, pengawasan peredaran penggunaan pupuk dan pestisida
- o. Fasilitasi koordinasi ketahanan pangan
- p. Kajian keamanan jajanan anak sekolah

Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- a. Menurunnya lahan pertanian
- b. Belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal
- c. Pengelolaan lumbung pangan masyarakat sebagian belum optimal.

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan ketahanan pangan pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengendalian alih fungsi lahan pertanian
- b. Peningkatan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan lokal
- c. Revitalisasi kelompok lumbung pangan masyarakat
- d. Peningkatan keterpaduan program penanganan daerah rawan pangan
- e. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- f. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Ketahanan Pangan

#### **14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kebijakan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman pada tahun 2005-2010 adalah

- a. Meningkatkan kesadaran terhadap Keadilan Gender Melalui Pemerataan Akses dan Tingkat Partisipasi Aktif
- b. Meningkatkan Kesadaran Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kalangan Masyarakat



Implementasi atas kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai program yang dilakukan yaitu :

- a. Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- b. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- d. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
- e. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
- f. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- g. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- h. Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak

Pelaksanaan berbagai urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut mampu meningkatkan indikator Indeks Pembangunan Gender. Penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tetapi menggunakan data terpilah yang meliputi Usia Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Konsumsi Riil per Kapita. Indeks Pembangunan Gender Sleman yang dihitung berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi, mengalami peningkatan dari 67,6 pada tahun 2002 menjadi 73,5 pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pada pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya pada kesetaraan gender.

**Tabel 3.30. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sleman Tahun 2002-2007**

Tahun	Nilai IPG / GDI
2002	67,6
2005	72,9
2006	72,9
2007	73,5

Sumber : Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sleman

Keterangan : Tahun 2003 dan 2004 tidak ada perhitungan IPG.



Dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi DIY, kondisi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sleman sebagai berikut :

**Tabel 3.31. Indeks Pembangunan Gender Provinsi D.I. Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2007**

No	Prop/Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender		
		2005	2006	2007
1	D.I.Yogyakarta	70,2	70,3	71,2
2	Kulon Progo	52,7	65,1	65,4
3	Gunung Kidul	61,0	62,9	64,1
4	Bantul	68,7	70,3	70,3
5	Sleman	72,9	72,9	73,5
6	Kota Yogyakarta	75,8	76,1	76,2

Sumber : Buku Statistik dan Analisis : Gender, Anak dan Perempuan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sleman menduduki peringkat kedua setelah Kota Yogyakarta. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman memberi perhatian pada pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Upaya pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjang dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

**Tabel 3.32. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1.	2005	65.870.000,00	65.840.000,00	99,95
2.	2006	79.160.500,00	76.070.500,00	96,10
3.	2007	36.600.000,00	36.600.000,00	100
4.	2008	297.373.000,00	290.176.400,00	97,58
5.	2009	129.130.000,00	127.930.000,00	99,07

Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp214.170.250,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak dengan koordinasi dan monitoring perlindungan perempuan dan anak
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
  - 1) Pelatihan bagi pelatih dan pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)





- 2) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pengarusutamaan
  - 3) Pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan dibidang perekonomian bagi kelompok PKK Padukuhan
  - 4) Penyelenggaraan hari anak nasional
- c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
- 1) Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
  - 2) Penyuluhan PUG dan pembinaan kelompok KB pria

Dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

- a. Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan dan anak meningkat;
- b. Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah;
- c. Kecenderungan meningkatnya jumlah anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah;

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diatas, dapat ditempuh kebijakan bagi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa mendatang, yaitu:

- a. Penyusunan regulasi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender melalui pemerataan akses dan tingkat partisipasi aktif.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat



## 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kebijakan pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sleman pada tahun 2005-2010 adalah pengendalian pertumbuhan penduduk melalui peningkatan jejaring pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Kecil berkualitas.

Implementasi atas kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai program yang dilakukan yaitu :

- a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan KB dan Manajemen Kependudukan.
- b. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga.
- c. Program Peningkatan Kualitas Data keluarga Sejahtera
- d. Program Pemberdayaan Keluarga
- e. Program Keluarga Berencana
- f. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi
- g. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Keluarga

Pelaksanaan berbagai urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahter tersebut mampu meningkatkan indikator pembangunan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berupa jumlah Pasangan Usia Subur, jumlah peserta KB aktif, jumlah peserta KB baru, prevalensi peserta KB, jumlah peserta KB pria, jumlah kelompok kegiatan KB, jumlah Keluarga Sejahtera yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.33. Capaian Indikator Pembangunan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

No	Indikator	Capaian Kabupaten Sleman				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	142.547	144.252	145.833	147.379	149.229
2	Jumlah Peserta KB Aktif	111.218	113.296	116.229	117.882	119.189
3	Jumlah Peserta KB Baru	9.014	8.297	10.910	10.644	10.630
4	Prevalensi Peserta KB	78,02%	78,54%	79,70%	79,99%	79,83%
5	Jumlah Peserta KB Mandiri	81.774	84.476	87.184	88.804	89.406
6	Jumlah Peserta KB Pria	7.884	8.165	7.844	8.087	8.338



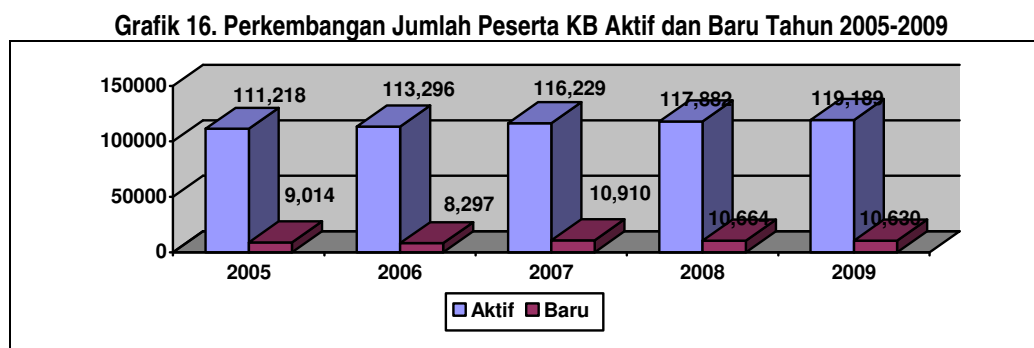
1	2	3	4	5	6	7
7	Jumlah Kelompok Kegiatan KB : a. Bina Keluarga Balita (BKB) b. Bina Keluarga Remaja (BKR) c. Bina Keluarga Lansia (BKL) d. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	145 100 108 971	144 98 108 937	141 97 103 814	140 101 112 769	148 115 125 787
8	Jumlah Keluarga Sejahtera a. Pra KS b. KS I c. KS II d. KS III e. KS III Plus	- - - - -	- - - - -	31.400 50.904 65.810 78.591 24.122	28.794 50.675 70.868 80.137 25.081	32.483 53.242 67.443 84.106 27.715
9	Jumlah KK	241.668	245.522	250.827	255.555	264.989

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Keterangan : Pada tahun 2005 dan 2006 belum ada pembagian sesuai klasifikasi di atas (nomor 8).

Program dan kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat meningkatkan jumlah peserta KB aktif dari tahun 2005 sebesar 111.218 peserta menjadi 119.189 peserta pada tahun 2009 atau meningkat rata-rata per tahun 1,43%. Sedangkan jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 142.547 pasangan pada tahun 2005 meningkat menjadi 149.229 pasangan pada tahun 2009. Tingkat prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2005 sebesar 78,02% meningkat menjadi 79,83% pada tahun 2009 atau meningkat 1,81%.

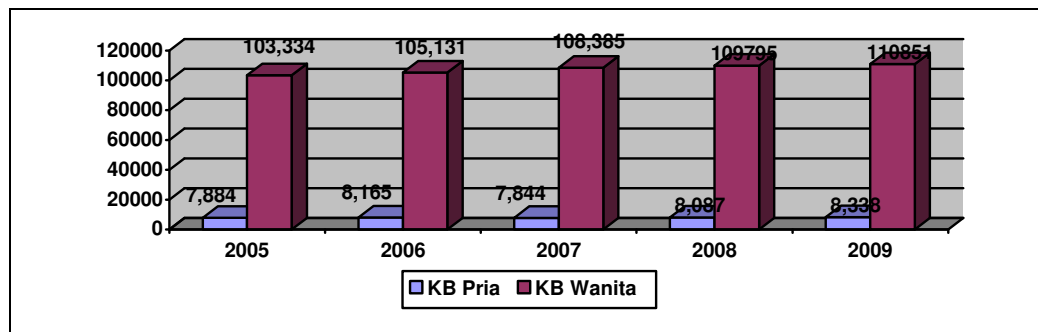
Perkembangan jumlah peserta KB Aktif dan Baru pada tahun 2005-2009 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Perkembangan keikutsertaan KB pria dan wanita mengalami peningkatan jumlah KB pria pada tahun 2005 sebanyak 7.884 peserta meningkat menjadi 8.338 peserta pada tahun 2009 atau meningkat rata-rata 1,14% per tahun dan keikutsertaan KB wanita sebanyak 103.334 peserta pada tahun 2005 meningkat menjadi 110.851 peserta pada tahun 2009, atau peningkatan rata-rata per tahun sebesar 1,45%. Perkembangan keikutsertaan KB dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 17. Perkembangan Jumlah Peserta KB Pria dan Wanita Tahun 2005-2009**



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana, 2009

Upaya pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditunjang dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

**Tabel 3.34. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1.	2005	326.130.000,00	319.097.300,00	97,84
2.	2006	669.351.400,00	663.508.396,00	99,13
3.	2007	1.058.312.720,00	1.009.869.720,00	95,42
4.	2008	1.334.452.000,00	1.317.196.300,00	98,71
5.	2009	618.376.000,00	602.283.320,00	97,40

Berbagai upaya dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selain meningkatkan jumlah peserta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, juga memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada masyarakat. Prestasi menonjol yang diraih Kabupaten Sleman dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di tingkat Nasional antara lain meliputi :



- a. Juara Nominasi 5 Besar Lomba Evaluasi Kelompok dan Pengelola BKB Tingkat Nasional oleh BKB Melati, Dusun Jamblangan, Purwobinangun, Pakem (Tahun 2005)
- b. Juara I Lomba TMKK-KB Tingkat Kodam IV Diponegoro oleh Kecamatan Moyudan (Tahun 2005)
- c. Juara III Lomba PPKBD Tingkat Nasional oleh Ny. Yustina Wardani Sidoluhur Godean (Tahun 2007)
- d. Penghargaan Ketahanan Pangan Kelompok Tani Agribisnis Hektikultura kepada Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (KPK Cempaka, Desa Margorejo Tempel) oleh Menteri Pertanian (Tahun 2008)
- e. Juara II Lomba Kelompok BKB Tingkat Nasional dari BKKBN Pusat oleh BKB Flamboyan, Bumirejo, Bangunkerto, Turi (Tahun 2009)

Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebesar Rp1.135.801.000,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Keluarga Berencana
  - 1) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
  - 2) Fasilitasi pelayanan KIE
  - 3) Harganas pertasikencana
  - 4) Fasilitasi pelayanan KB-KR dan pengembangan jaringan kerja
  - 5) Pembinaan dan pengendalian program KB
  - 6) Analisa dan penyajian data KB-KS
  - 7) Fasilitasi bhakti TNI KB terpadu
- b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja melalui kegiatan pembinaan hak kesehatan reproduksi remaja
- c. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB, KR yan mandiri
  - 1) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
  - 2) Pembinaan BKS
  - 3) P2WKSS



Dalam penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain:

- a. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata.
- b. Jumlah Pasangan Usia Subur yang mengikuti program KB belum optimal.
- c. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal;
- d. Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal;
- e. Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR dan PKLK) belum optimal.

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diatas, dapat ditempuh kebijakan bagi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di masa mendatang, yaitu:

- a. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.
- b. Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui peningkatan jejaring pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas.
- c. Meningkatkan pembinaan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.
- d. Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
- e. Meningkatkan kuantitas peserta KB.

## **16. Urusan Perhubungan**

Dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perhubungan dengan dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang.

Kebijakan tersebut terimplementasi dalam program sebagai berikut:



- a. peningkatan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas;
- b. rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan;
- c. peningkatan manajemen lalu lintas dengan kegiatan pembinaan tertib lalulintas;
- d. pengendalian dan pengawasan lalu lintas;
- e. pembentukan produk hukum, penegakan hukum, dan hak asasi manusia.

Pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan tersebut mampu mendukung keberhasilan pembangunan perhubungan selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010) mencapai hasil dengan indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.35. Data Perhubungan Kabupaten Sleman**

No	Keterangan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah kendaraan angkutan umum:					
	a. Penumpang					
	- AKDP	1.074	591	591	585	585
	- Pedesaan	309	306	288	275	288
	b. Barang	7.387	6.715	6.120	6.115	6.251
	c. Wisata	85	392	85	85	85
2.	Jumlah pengusaha angkutan umum:					
	a. AKAP	6	4	29	29	29
	b. AKDP	8	8	31	31	30
	c. Pedesaan	2	2	2	2	2
3.	Jumlah Terminal					
	a. Terminal	1	1	1	1	1
	b. sub terminal	4	4	4	4	4
4.	Jumlah Perlengkapan Jalan	560	661	810	914	1.000
	a. Lampu Pengatur Lalin Kabupaten	5	5	5	5	5
	b. Lampu Pengatur Lalin Provinsi	28	29	28	32	33
	c. Rambu-rambu Lalu Lintas	527	627	777	877	962
5.	Pengelolaan Parkir					
	a. Jumlah Lokasi	172	181	288	298	286
	b. Jumlah Juru Parkir	379	504	661	284	657



1	2	3	4	5	6	7
6.	Penerbitan Izin:					
	a.Trayek Pedesaan	641	613	641	641	578
	b.Usaha Angkutan	16	6	16	17	26
7.	Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17.416	16.104	17.308	15.702	17.541
8.	Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan AKDP	5	7	5	4	5
9.	Pembangunan LPJU:	7.650	8.895	8.930	9.141	9.662
	a. Natrium/Mercuri	3.608	4.853	4.888	5.099	7.155
	b.TL	2.807	2.807	2.807	2.807	2.307
	c. Pijar	1.235	1.235	1.235	1.235	200
10.	Pemeliharaan LPJU:	1.162	1.360	6.590	7.732	6.720
	a. Natrium/Mercuri	1.014	1.250	3.753	3.987	4.165
	b.TL	100	80	2.807	2.570	1.255
	c. Pijar	48	30	30	1175	1300
11.	KWH meter LPJU	14	35	44	65	85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Perkembangan jumlah kendaraan angkutan umum untuk penumpang dan barang dari tahun 2005 sampai 2009 cenderung menurun, dari data yang ada pada tahun 2005 untuk kendaraan angkutan penumpang AKDP sebanyak 1.074 kendaraan menurun menjadi 585 kendaraan pada tahun 2009 atau menurun sebesar 45,53%. Sedangkan untuk kendaraan angkutan penumpang pedesaan juga mengalami penurunan sebesar 6,8% yaitu pada tahun 2005 sebanyak 309 kendaraan menjadi pada tahun 2009 sebanyak 288 kendaraan. Penurunan jumlah kendaraan angkutan umum juga diikuti dengan penurunan jumlah kendaraan angkutan barang yaitu pada tahun 2005 sebanyak 7.387 kendaraan menjadi 6.251 kendaraan pada tahun 2009 atau menurun 15,38%. Sedangkan untuk jumlah kendaraan wisata relatif tetap yaitu sebanyak 85 kendaraan. Penurunan jumlah kendaraan tersebut disebabkan antara lain karena biaya operasional kendaraan yang selalu meningkat, harga onderdil kendaraan yang selalu naik, dan harga bahan bakar yang selalui naik yang tidak diikuti dengan pendapatan yang diperoleh dari penumpang.





Jumlah pengusaha angkutan umum untuk AKAP dan AKDP di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan yang sangat besar. AKAP pada tahun 2005 sebanyak 6 pengusaha dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 29 pengusaha atau meningkat sebesar 383,3%, demikian juga dengan AKDP juga mengalami peningkatan yang signifikan, data yang ada menunjukkan pada tahun 2005 sebanyak 8 pengusaha dan pada tahun 2009 meningkat menjadi sebanyak 30 kendaraan atau meningkat sebesar 275%.

Jumlah perlengkapan lalu lintas jalan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebanyak 560 buah dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.000 buah atau meningkat sebesar 78,57%. Peningkatan jumlah perlengkapan lalu lintas di Sleman ini dipicu oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang berlalu lintas di jalan dan dalam rangka memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada masyarakat di bidang perhubungan. Pelayanan secara optimal perlu selalu dikembangkan sehingga dalam pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan dari 17.416 kendaraan pada tahun 2005 menjadi 17.541 kendaraan pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 0,72%.

Penerangan jalan umum juga mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2005 telah dipasang 7.650 buah meningkat sebesar 42,31% menjadi 10.887 buah pada tahun 2009. Sedangkan dalam hal pemeliharaan lampu penerangan jalan pada tahun 2005 telah dipasang sebanyak 1.162 buah yang kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi 6.750 buah atau meningkat sebesar 478,31. Peningkatan juga terjadi pada pemasangan kWh meter yaitu pada tahun 2005 hanya ada 14 buah, sedangkan pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 84 buah atau sebesar 507,14 pada tahun 2009. Berbagai upaya dalam urusan perhubungan tidak hanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan keselamatan masyarakat, tetapi juga diapresiasi dengan mendapatkan penghargaan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Prestasi menonjol yang diraih Kabupaten Sleman dalam



urusan perhubungan yaitu pada tahun 2005, Saudara Sunardi, Ama.PKB menjadi Petugas Penguji Kendaraan Bermotor Teladan Tingkat Nasional (Juara II).

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Perhubungan dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.36. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Perhubungan**

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1.	2005	1.728.583.500,00	1.722.372.105,00	99,64
2.	2006	2.643.507.275,00	2.569.291.125,00	97,19
3.	2007	4.515.635.000,00	4.293.196.150,00	95,06
4.	2008	16.035.368.520,00	6.270.224.950,00	39,10
5.	2009	8.883.662.000,00	8.351.880.414,00	94,01

Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan perhubungan sebesar Rp5.774.980.250,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan
  - a. Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
  - b. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
  - a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
  - b. Rehabilitasi dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
  - a. Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
  - b. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
  - c. Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal
  - d. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan



- d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
  - a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
  - b. Pengelolaan perpajakan
- e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
  - a. Pelayanan uji kendaraan bermotor
  - b. Pembinaan perbengkelan

Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan sampai dengan tahun 2009 masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan penyelenggaraan urusan perhubungan antara lain:

- a. Meningkatnya pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan panjang jalan/prasarana dan sarana yang ada.
- b. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
- c. Terminal angkutan barang dan *rest area* kendaraan barang belum tersedia;
- d. Kesadaran masyarakat untuk uji kendaraan masih rendah.

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan perhubungan pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan, antara lain:

- a. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dana prasarana perhubungan;
- b. Peningkatan pelayanan angkutan;
- c. Peningkatan dan pengamanan lalu lintas;
- d. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

## **17. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja, ketersediaan dan akurasi data, proses komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi termasuk pengembangan e-goverment dalam



penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah

- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perhubungan dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program pengembangan komunikasi, informasi dan media Massa

Pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan tersebut mampu mendukung keberhasilan pembangunan komunikasi dan informatika selama kurun waktu 5 tahun (2005 - 2009) mencapai hasil yang cukup menggembirakan dengan indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.37. Data Pencapaian Hasil Pembangunan Komunikasi dan Informatika**

No	Keterangan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Sarana dan prasarana telekomunikasi internal dan eksternal	522	567	567	656	856
2	Website ( unit )	1	1	1	1	1
3	Intranet / LAN	330	428	428	500	500
4	Sub domain	5	7	13	37	37
5	Pengembangan SIM	10	16	16	16	19
6	Pengembangan infrastruktur ( WAN )	23	28	36	50	55

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Sleman telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Permasalahan yang ditemui juga lebih pada permasalahan internal yang berkaitan dengan ketersediaan SDM dan sarana dan prasarana yang ada yang perkembangannya seringkali tidak mampu mengimbangi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia yang setiap detik terus berkembang.

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu 2005-2009 tersebut mampu melancarkan komunikasi dan informasi antar



instansi maupun di lingkungan Pemkab maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan semua instansi di lingkungan Pemkab Sleman dan kantor kecamatan sudah terhubung secara on line, dan masyarakat dapat mengakses informasi melalui website [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id).

Perkembangan informatika di Kabupaten Sleman telah mampu mendukung terwujudnya e-gov di Kabupaten Sleman. Portal internet [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id) terus dikembangkan. Pada tahun 2005 baru memiliki 5 sub domain saat ini website ini memiliki 37 sub domain yang dikelola oleh masing masing instansi. Koneksi internet juga terus ditingkatkan kapasitasnya. Pada tahun 2005 koneksi internet hanya berkapasitas 512 kbps, pada tahun 2009 telah berkapasitas 1.3 Mbps yang dipakai oleh 250 komputer di seluruh instansi. Perkembangan sistem informasi dari tahun 2005 sampai 2009 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 Pemkab Sleman memiliki 10 Sistem Informasi (SIM ) pada tahun 2009 meningkat menjadi 19 SIM.

Sarana telekomunikasi juga makin lengkap dan meningkat jumlahnya. Sistem PABX yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antar dan intra instansi terus dikembangkan. Pada tahun 2005 jumlah ekstension yang dikembangkan dengan sistem PABX 243 ekstension, pada tahun 2009 meningkat menjadi 335 ekstensi. Selain itu telepon ekstensi juga dikembangkan dengan VOIP, bahkan saat ini 17 kecamatan juga telah terpasang ekstensi dengan VOIP.

Pembangunan komunikasi dan informatika juga membantu memberikan peringatan dini bahaya bencana Merapi. Sampai tahun 2009 untuk memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat di sekitar wilayah rawan bencana Merapi telah dipasang 4 buah sirene tanda bencana alam yang ditempatkan di Balai Istirahat Kaliurang (BIK) Wara Kaliurang, Tritis, dan



Kalitengah dan Kaliadem (kondisi rusak karena terkena lahar). Bahkan sejak tahun 2008 juga dipasang 3 buah kamera untuk mengamati aktivitas Gunung Merapi yang dipasang di Kaliurang, Tritis dan Kaliadem. Dengan kamera tersebut aktivitas di Gunung Merapi dapat dipantau dari 3 sisi.

Saat ini juga telah dioperasikan mobil telekomunikasi peralatan komunikasi meliputi telepon ekstension, radio komunikasi, serta peralatan komunikasi yang akan dikembangkan sebagai alat komunikasi data. Dengan adanya peralatan komunikasi data/*voice* yang bersifat *mobile* diharapkan dapat dikembangkan sebagai sarana sosialisasi IT pada masyarakat.

Pengelolaan berita yang bersifat rahasia khususnya yang menyangkut kestabilan negara juga dilakukan dengan baik melalui persandian. Dengan ini kebocoran berita dapat diminimalisir.

Pengembangan infrastruktur jaringan komputer terus dilakukan yang meliputi pengembangan jaringan komputer internal instansi (dalam instansi) dan antar instansi. Saat ini seluruh instansi telah terhubung secara *on line*.

Pengembangan perangkat lunak juga terus dilakukan yakni dengan pengembangan/penambahan perangkat lunak original yang dibutuhkan seperti MS Windows, MS Office dsb dan pengembangan aplikasi sistem informasi.

Untuk pengembangan/penambahan aplikasi sistem informasi dilakukan secara bertahap terpadu dan terintegrasi. Untuk itu telah diterapkan standarisasi jenis perangkat lunak standard yang harus dipakai untuk pengembangan aplikasi. Pengembangan sistem informasi (SIM) terus dilakukan. Pada tahun 2005 SIM yang dikembangkan baru 10 SIM, pada tahun 2009 telah menjadi 19 SIM .



Untuk memberikan kemudahan masyarakat mengakses internet juga telah dikembangkan hotspot di berbagai tempat. Pada tahun 2005 belum ada area yang dipasang hotspot, pada tahun 2009 telah dipasang hotspot secara terintegrasi di 6 lokasi/ instansi.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Komunikasi dan informatika dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

Berbagai upaya dalam urusan komunikasi dan informatika tidak hanya meningkatkan pelayanan masyarakat dalam komunikasi dan meningkatkan efisiensi kerja di kantor, tetapi juga diapresiasi dengan mendapatkan penghargaan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Prestasi menonjol yang diraih Kabupaten Sleman dalam urusan komunikasi dan informatika meliputi :

- a. Terbaik ke-3 kategori Pemerintah Kabupaten Sebagai Lembaga Pemerintah Pengaplikasi E-Government 2005 dari Majalah Warta Ekonomi (Tahun 2005)
- b. Nominator 10 besar E-Government award tahun 2006 dari Majalah Warta Ekonomi (Tahun 2006)
- c. Website Terbaik kategori Kabupaten pada Majalah Warta Ekonomi E-Government Award 2008 dari Majalah Warta Ekonomi (Tahun 2008)

**Tabel 3.38. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika**

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase
1.	2005	680.395.000,00	652.844.650,00	95,95
2.	2006	730.362.000,00	694.025.300,00	95,02
3.	2007	2.154.964.530,00	1.987.483.935,00	92,23
4.	2008	2.821.830.000,00	2.667.884.188,00	94,54
5.	2009	2.821.233.650,00	2.688.980.970,00	95,31

Untuk tahun 2010 anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp1.159.429.750,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:



- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  - 1) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
  - 2) Pelayanan masyarakat dalam pos dan telekomunikasi
  - 3) Penyusunan Buku Informasi Pembangunan Tahun 2010
  - 4) Pengelolaan website Bappeda
  - 5) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
  - 6) Implementasi IGOS dan pengembangan sarana prasarana telekomunikasi
  - 7) Pelayanan informasi berbasis SIM/Call Center
  - 8) Pengelolaan dan pengembangan VoIP Kecamatan
  - 9) Pemasangan Sub PABX dan jaringan extension desa
  - 10) Pengelolaan dan pengembangan persandian daerah
  - 11) Penerbitan Siaran Parlemen, booklet, leaflet dan buletin
  - 12) Dokumentasi kegiatan dewan, pelayanan pers, dialog interaktif dan keprotokolan
  - 13) Pengelolaan informasi melalui internet dan anjungan
  - 14) Pengadaan alat studio dan komunikasi
  - 15) Pengelolaan web pertanian dan kehutanan
  - 16) Pembuatan peta potensi pertanian dan kehutanan
- b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
  - 1) Pengkajian opini dan polling pendapat
  - 2) Pengkajian penggunaan media dan monitoring issue dan permasalahan melalui media massa

Namun demikian selama melaksanakan kebijakan tersebut masih dijumpai kekurangan atau kelemahan yaitu kualitas sebagian sumberdaya manusia belum memadai dalam penguasaan teknologi informasi

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :





- a. Kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika harus terus ditingkatkan baik kualitas maupun jumlah SDMnya.
- b. Meningkatkan ketersediaan akses data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat.
- c. Mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi data di seluruh instansi.
- d. Mengembangkan sistem pelayanan pemerintahan dan pembangunan melalui *e-Gov*.
- e. Mengembangkan sistem informasi secara terintegrasi, standar dan terpadu dalam rangka *e-Gov*.